



*Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan*



## LAPORAN KINERJA (LKj)

**BADAN PENYULUHAN DAN  
PENGEMBANGAN SDM  
TAHUN 2016**

LAPORAN KINERJA (LKj) BADAN P2SDM TAHUN 2016



Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM  
Gd. Manggala Wanabakti , Blok I lantai 14  
Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270  
Website : <http://bp2sdm.menlhk.go.id>

JAKARTA, 2017

# KATA PENGANTAR

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM) merupakan organisasi dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki peran strategis dalam upaya membangun SDM lingkungan hidup dan kehutanan. Sejalan dengan peran strategis tersebut, Badan P2SDM merupakan *supporting system* dalam pengembangan SDM untuk menciptakan tenaga-tenaga yang profesional dan kompeten di bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Pada Tahun 2016, Badan P2SDM menjalankan program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sebagaimana telah direncanakan pada Rencana Strategis (Renstra) Badan P2SDM Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 yang diikat dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 antara Kepala Badan P2SDM dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK).

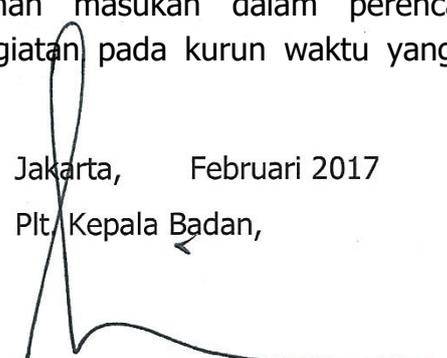
Sebagai bentuk pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja kepada Menteri LHK dan Publik, Badan P2SDM menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja Badan P2SDM Tahun 2016 sebesar 100,66 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp332.037.996.961,- atau 95,40 % dari pagu anggaran APBN-P Tahun 2016. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2015 sebesar 92,97 %, maka Badan P2SDM telah berkinerja efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata efektivitas capaian kinerja sebesar 1,08.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja pelaksanaan pembangunan program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu yang akan datang.

Jakarta, Februari 2017

Plt. Kepala Badan,

  
Dr. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA  
NIP. 19571020 198203 1 002







# RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan P2SDM mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan karena terkait dengan upaya membangun SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karenanya program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM harus mampu memberikan dukungan yang maksimal untuk keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak.

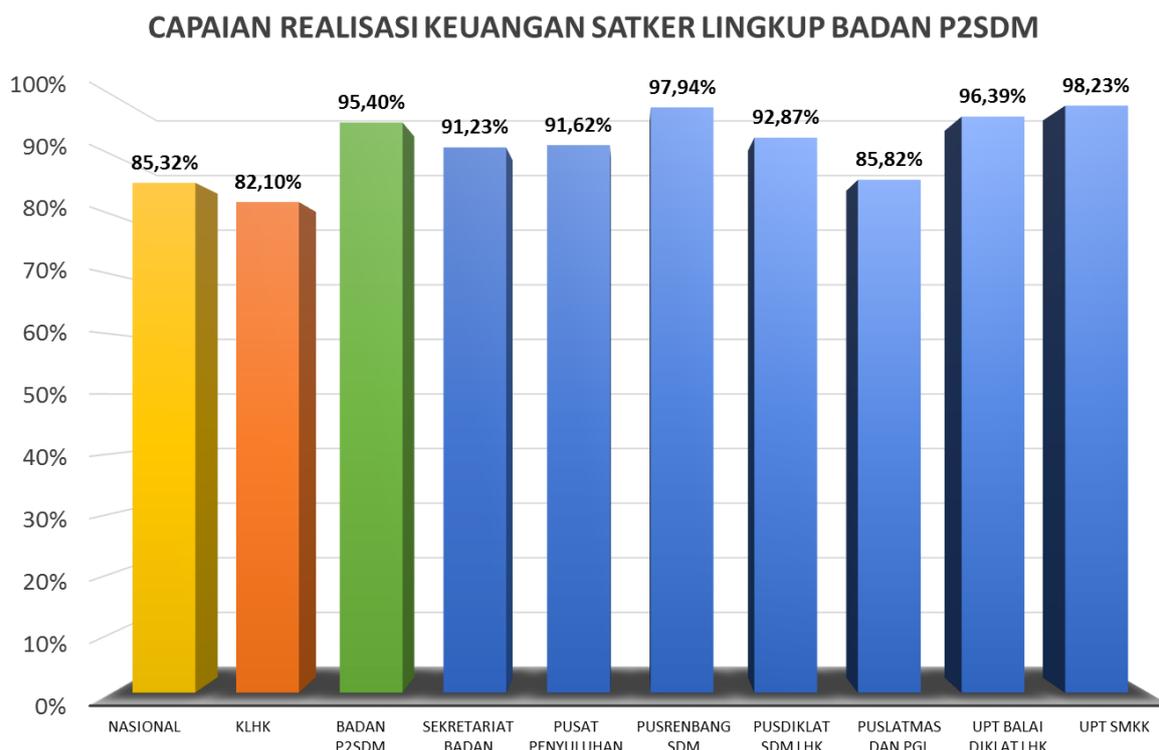
Sejalan dengan itu, dalam upaya mewujudkannya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.39/Menlhk-II/2015 tentang Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan P2SDM Tahun 2015-2019. Berdasarkan Rencana Strategis tersebut, Badan P2SDM menetapkan sasaran program yaitu:

1. Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.
2. Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.

Untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disusunlah Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan P2SDM yang diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016. Adapun capaian kinerja Badan P2SDM Pada Tahun 2016 dan progres capaian Renstra s.d Tahun 2016 sebagaimana Tabel berikut.

Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian 2016 (%)	Efektivitas	Efisiensi	Progres Renstra (%)
1) Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya	100,42	1,59	1,10	14,89
2) Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten,	111,27	1,03	1,14	14,31
3) Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya	99,51	0,91	1,03	25,44
4) Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya dan Sekolah/Kampus yang berbudaya lingkungan	82,00	0,90	0,96	17,70
	100,86	1,10	1,17	26,98
<b>Rata-Rata Capaian</b>	<b>100,66</b>	<b>1,08</b>	<b>1,06</b>	<b>19,25</b>

Untuk mencapai kinerja sebagaimana tersebut diatas, Badan P2SDM Tahun 2016 didukung anggaran sebesar Rp. 348.061.545.000,- dengan Realisasi anggaran s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 332.037.996.961,- atau sebesar 95,40 % dari pagu APBN-P. Capaian tersebut setara dengan 99,28% terhadap pagu anggaran setelah dikurangi *self blocking*. Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran Badan P2SDM maupun Satker lingkup Badan P2SDM masih berada diatas rata-rata capaian Kementerian LHK maupun Nasional sebagaimana gambar dibawah ini.



# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	3
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Kondisi Organisasi .....	5
1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
2. Sumber Daya Manusia .....	10
3. Sarana dan Prasarana.....	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	17
A. Rencana Strategis (Renstra) Badan P2SDM Tahun 2015-2019.....	19
1. Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan..	19
2. Sasaran Strategis Badan P2SDM.....	21
B. Indikator Kinerja Program (IKP) / Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan P2SDM Tahun 2015-2019 .....	21
C. Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan P2SDM Tahun 2016 .....	22
1. Strategi Pencapaian Sasaran Program Badan P2SDM Tahun 2016 ..	22
2. Program dan Kegiatan .....	23
3. Target Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan P2SDM Tahun 2016 .....	23
4. DIPA Badan P2SDM Tahun Anggaran 2016 .....	26
D. Perjanjian Kinerja (PK) .....	28

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	33
1. Reviu atas Dokumen Perencanaan.....	33
2. Reviu Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Laporan Kinerja Tahun 2015.....	35
3. Metode Pengukuran .....	37
4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016.....	38
5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	43
B. Capaian Realisasi Anggaran .....	68
BAB IV. PENUTUP .....	71

# DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan dan Staf Lingkup Badan P2SDM.....	10
Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM pada Satker Pusat Berdasarkan Golongan.....	10
Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM pada Satker Pusat Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	11
Tabel 4. Rekapitulasi Pegawai Unit Pelaksana Teknis Badan P2SDM Berdasarkan Golongan.....	11
Tabel 5. Rekapitulasi Pegawai Unit Pelaksana Teknis Badan P2SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	12
Tabel 6. Sarana dan Prasarana Kantor Badan P2SDM pada Unit Kerja Eselon II lingkup Badan P2SDM.....	12
Tabel 7. Hubungan Sasaran Strategis Kementerian LHK dengan Sasaran Badan P2SDM Tahun 2015-2019 .....	21
Tabel 8. Indikator Kinerja Program Badan P2SDM Tahun 2015-2019 .....	22
Tabel 9. Target Indikator Kinerja Program (IKP) Badan P2SDM Tahun 2016 .....	24
Tabel 10. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan P2SDM Tahun 2016.....	24
Tabel 11. Alokasi Pagu Anggaran APBN dan APBN-P Tahun 2016 Per Kegiatan .....	26
Tabel 12. Pagu Anggaran dan Self Blocking Badan P2SDM Tahun 2016.....	27
Tabel 13. Perjanjian Kinerja Badan P2SDM tahun 2016 .....	29
Tabel 14. Alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja Badan P2SDM tahun 2016 .....	29
Tabel 15. Perubahan Target IKK Badan P2SDM.....	33
Tabel 16. Hasil Evaluasi SAKIP Badan P2SDM Tahun 2015.....	35
Tabel 17. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Badan P2SDM Tahun 2016 .....	39
Tabel 18. Efektivitas Capaian Kinerja Badan P2SDM Tahun 2016.....	40
Tabel 19. Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Badan P2SDM Tahun 2016 .....	41

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 20. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Badan P2SDM Tahun 2016 Terhadap Renstra Tahun 2015 – 2019.....	42
Tabel 21. Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2016 .....	44
Tabel 22. Rincian Peningkatan Kelas KTH dan Pembentukan Koperasi KTH.....	44
Tabel 23. Rincian Peningkatan Kelas KTH dan Pembentukan Koperasi KTH.....	46
Tabel 24. Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 2 tahun 2016 .....	50
Tabel 25. Rekrutmen Tenaga Bakti Rimbawan dan SDM LHK Kompeten Tahun 2016.....	50
Tabel 26. Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2016 .....	54
Tabel 27. Rincian Peningkatan Kapasitas SDM LHK Tahun 2016.....	55
Tabel 28. Pelaksanaan Diklat pada Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Diklat LHK .....	56
Tabel 29. Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2016 .....	61
Tabel 30. Rincian capaian generasi lingkungan meningkat kapasitasnya dan sekolah/kampus berbudaya LH.....	62
Tabel 31. Hasil Pengukuran Capaian Kerja Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan P2SDM .....	67
Tabel 32. Komponen Penilaian SAKIP Badan P2SDM .....	68
Tabel 33. Realisasi Anggaran Per Kegiatan lingkup Badan P2SDM Tahun 2016.....	68
Tabel 34. Realisasi Anggaran Per Satker lingkup Badan P2SDM Tahun 2016 .....	69

# DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Badan P2SDM .....	6
Gambar 2. Foto Perjanjian Kinerja Kepala Badan dengan Kepala Pusat Lingkup Badan P2SDM .....	28
Gambar 3. Peningkatan Kelas KTH .....	45
Gambar 4. Progres Capaian Indikator Kinerja 1 s.d Tahun 2016.....	47
Gambar 5. Koperasi Kelompok Tani Hutan.....	48
Gambar 6. Penyematan rompi dan topi untuk tenaga bakti rimbawan Tahun 2016.....	49
Gambar 7. Pengarahan Persiapan Praktek Lapangan pada tenaga bakti rimbawan .....	51
Gambar 8. Progres capaian Indikator kinerja 2 s.d Tahun 2016 .....	51
Gambar 9. Pelaksanaan Uji Kompetensi SDM LHK Tahun 2016 .....	53
Gambar 10. Pelaksaaan Praktek pada Kegiatan Diklat.....	54
Gambar 11. Progres Capaian Indikator Kinerja 3 s.d Tahun 2016 .....	56
Gambar 12. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Kelas .....	57
Gambar 13. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan ....	58
Gambar 14. Pelatihan Perilaku Ramah Lingkungan .....	61
Gambar 15. Sekolah penerima penghargaan adiwiyata .....	64
Gambar 16. Progres Capaian Indikator Kinerja sekolah/kampus yang berbudaya LH s.d Tahun 2016.....	66
Gambar 17. Progres Capaian Indikator Kinerja generasi lingkungan meningkat kapasitasnya s.d Tahun 2016.....	66

# DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Badan P2SDM dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Lampiran 2. Nota Dinas dan Pernyataan Revisi Perjanjian Kinerja Badan P2SDM
- Lampiran 3. Rincian Capaian Peningkatan Kelas KTH melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Kehutanan
- Lampiran 4. Rincian peningkatan Kelas KTH dampak regulasi
- Lampiran 5. Rincian Terbentuknya Koperasi KTH
- Lampiran 6. Rincian Penempatan Rekrutmen Tenaga Bakti Rimbawan
- Lampiran 7. Rincian Pelaksanaan Kegiatan Uji Kompetensi SDM LHK
- Lampiran 8. Rincian Capaian Meningkatnya Kapasitas Geneasi Muda LH
- Lampiran 9. Sebaran Saka Kalpataru Penegak dan Pandega
- Lampiran 10. SK Kepala Badan P2SDM tentang Personil Pengelola Kinerja Lingkup badan P2SDM Tahun 2016
- Lampiran 11. Surat Kepala Badan P2SDM pada Sekretaris Jenderal KLHK sesuai Rekomendasi Inspektorat Jenderal KLHK atas Implementasi SAKIP Tahun 2015
- Lampiran 12. Perubahan Target Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2016 sebagai Tindak Lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal KLHK atas Implementasi SAKIP Tahun 2015
- Lampiran 13. Surat Kepala Pusat Diklat terhadap Tindak Lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal KLHK atas Implementasi SAKIP Tahun 2015

# DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Bakorluh	: Badan Koordinasi Penyuluhan
Bapeluh	: Badan Pelaksana Penyuluhan
BLHD	: Badan Lingkungan Hidup Daerah
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
KHm	: Hutan Kemasyarakatan
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKU	: Indikator Kinerja Utama
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KTH	: Kelompok Tani Hutan
KUP	: Kelompok Usaha Produktif
LH	: Lingkungan Hidup
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LKj	: Laporan Kinerja
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LSP	: Lembaga Sertifikasi Profesi
P2SDM	: Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PK	: Perjanjian Kinerja
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RSKKNI	: Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SDH	: Sumber Daya Hutan
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMKK	: Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UU	: Undang Undang





# 1

## PENDAHULUAN



## A. Latar Belakang

Tantangan dalam pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dan peningkatan kualitas lingkungan hidup saat ini semakin kompleks dan dinamis mulai dari penataan pola ruang yang tidak terkendali, penyelesaian konflik, rendahnya kondisi lingkungan, kebakaran hutan, menurunnya keanekaragaman hayati, dll. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam mengelola bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan P2SDM berada pada salah satu Eselon I di Kementerian LHK serta memiliki peran penting dalam menyediakan SDM baik dari segi kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai dinamika dan tantangan kekinian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap program dan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada pemberi mandat atas kinerja dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Badan P2SDM menyusun Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja Badan P2SDM Tahun 2016 dan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pemantapan/reviu perencanaan pada waktu yang akan datang.

Laporan Kinerja (LKj) Badan P2SDM Tahun 2016 ini merupakan penjabaran dari hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Program (IKP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 dan kemudian dijabarkan pada Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2016.

Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Insntansi Pemerintah adalah :

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi kementerian Negara;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- 9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
- 10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Kerja Kementerian LHK Tahun 2016;
- 11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi Balai Diklat LHK;
- 12) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang organisasi SMKK Kehutanan;
- 13) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kerja Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
- 14) Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.05/SETBP2SDM/2015 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2015-2019;
- 15) Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.07/SETBP2SDM/2015 tentang Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2016;

## **B. Tugas Pokok, Fungsi dan Kondisi Organisasi**

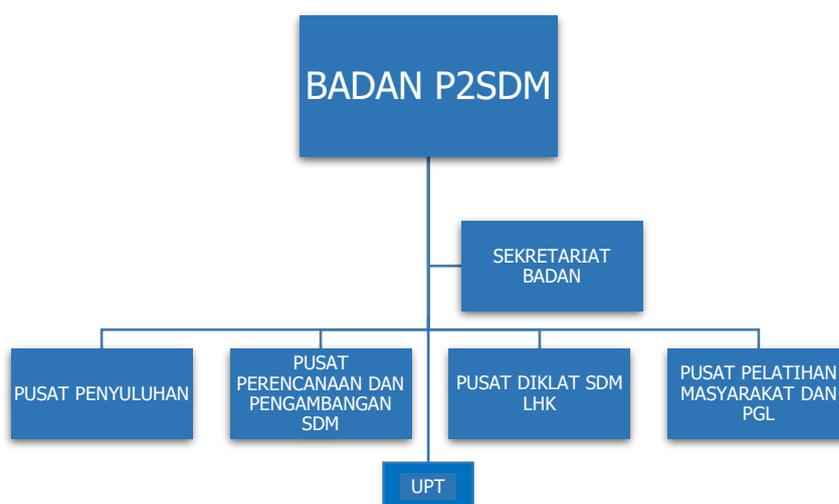
### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM) merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Badan P2SDM mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan P2SDM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;

- b. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan P2SDM; dan
- g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan P2SDM membawahi 5 (lima) eselon II yaitu Sekretariat Badan, Pusat Penyuluhan, Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, dan 12 (dua belas) Unit Pelaksana Tugas (UPT) yaitu 7 (tujuh) Balai Diklat LHK dan 5 (lima) SMK Kehutanan Negeri.



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan P2SDM

Sekretariat Badan P2SDM	Tugas	Melaksanakan pembinaan, administrasi di lingkungan Badan koordinasi serta pelayanan
	Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran dan kerja sama;</li> <li>• Koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program dan anggaran;</li> <li>• Koordinasi dan pengelolaan data, informasi, dokumentasi dan publikasi hasil penyuluhan;</li> <li>• Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan</li> </ul>
Pusat Penyuluhan	Tugas	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan
	Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan metode sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;</li> <li>• Penyiapan pelaksanaan tugas pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;</li> <li>• Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;</li> <li>• Bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan; dan</li> <li>• Pelaksanaan administrasi Pusat</li> </ul>
Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	Tugas	Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan sumber daya aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan

	<h2 style="text-align: center;">Fungsi</h2>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rencana, program, kerja sama dan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standar kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan;</li> <li>• Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standar kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan;</li> <li>• Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standar kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan; dan</li> <li>• Pelaksanaan administrasi Pusat.</li> </ul>
<p>Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	<h2 style="text-align: center;">Tugas</h2>	<p>Melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan</p>
	<h2 style="text-align: center;">Fungsi</h2>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rencana, program, kerja sama dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;</li> <li>• Penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;</li> <li>• Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan</li> <li>• Bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan; dan</li> <li>• Pelaksanaan administrasi Pusat</li> </ul>
<p>Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan</p>	<h2 style="text-align: center;">Tugas</h2>	<p>Melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan</p>
	<h2 style="text-align: center;">Fungsi</h2>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rencana, program dan kerja sama pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan;</li> </ul>

Generasi Lingkungan

- Penyiapan perumusan kebijakan pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan;
- Pelaksanaan kebijakan pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan;
- Bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan; dan
- Pelaksanaan administrasi Pusat

Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tugas

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Fungsi

- Penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan pelayanan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pelaksanaan pelayanan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan

Tugas

Melaksanakan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program pendidikan pengajaran;
- Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah;
- Pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pengajaran;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## 2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Badan P2SDM secara keseluruhan sebanyak 1.056 orang PNS dan 349 orang tenaga kontrak yang tersebar di unit kerja Pusat dan UPT sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan dan Staf Lingkup Badan P2SDM

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon I	1
2.	Eselon II	5
3.	Eselon III	
	- Pusat	18
	- UPT (Balai Diklat LHK)	7
4.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan	5
5.	Eselon IV	
	- Pusat	42
	- UPT (Balai Diklat LHK dan SMKK Negeri)	26
6.	Staf PNS	
	- Pusat	252
	- UPT (Balai Diklat LHK) dan SMKK Negeri	700
	Jumlah PNS (1-6)	1.056
7.	Tenaga Kontrak	349
	Total Pegawai (1-7)	1.405

### a. Pegawai Satker Pusat

Penyelenggaraan kegiatan Badan P2SDM pada Satuan Kerja Pusat didukung personil sebanyak 318 orang dengan jumlah berdasarkan golongan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM pada Satker Pusat Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	53	20	73
2	Golongan III	102	96	198
3	Golongan II	29	17	46
4	Golongan I	1	0	1
	Jumlah	185	133	318

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebaran pegawai Badan P2SDM pada Satuan Kerja Pusat sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM pada Satker Pusat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1	S3	9	6	15
2	S2	57	13	70
3	S1/D4	51	75	126
4	D3	14	20	34
5	SLTA/D1/D2	46	16	62
6	SLTP	4	1	5
7	SD	4	2	6
	Jumlah	185	133	318

#### b. Pegawai Satker UPT Badan P2SDM

Penyelenggaraan kegiatan Badan P2SDM pada Unit Pelaksana Teknis (Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan SMK Kehutanan Negeri) didukung personil sebanyak 738 orang dengan jumlah berdasarkan golongan sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rekapitulasi Pegawai Unit Pelaksana Teknis Badan P2SDM Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	73	26	99
2	Golongan III	256	138	394
3	Golongan II	168	50	218
4	Golongan I	24	3	27
	Jumlah	521	217	738

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebaran pegawai Badan P2SDM pada Unit Pelaksana Teknis sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Rekapitulasi Pegawai Unit Pelaksana Teknis Badan P2SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1	S3	9	3	12
2	S2	75	29	104
3	S1/D4	158	86	244
4	D3	21	20	41
5	SLTA/D1/D2	211	73	284
6	SLTP	28	3	31
7	SD	19	3	22
	Jumlah	521	217	738

### 3. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran tugas Badan P2SDM, dilengkapi dengan sarana prasarana perkantoran dan sarana transportasi pada Satker Pusat lingkup Badan P2SDM, secara rinci sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Sarana dan Prasarana Kantor Badan P2SDM pada Unit Kerja Eselon II lingkup Badan P2SDM

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
<b>I Sekretariat Badan P2SDM</b>				
1	Jeep	1	1	2
2	Sedan	2	-	2
3	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	14	-	14
4	Sepeda Motor	324	-	324
	a. Sekretariat Badan	9	-	9
	b. Kabupaten/Kota (Penyuluh Kehutanan)	315	-	315
5	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2	-	2
6	Lemari Besi/Metal	21	-	21
7	Lemari Kayu	33	-	33
8	Rak Kayu	9	-	9
9	Brandkas	5	-	5
10	Kardex Besi	13	-	13
11	Lemari Katalog	5	-	5
12	White Board	3	-	3
13	Alat Penghancur Kertas	3	-	3
14	Mesin Absensi	5	-	5
15	LCD Projector/Infokus	11	-	11
16	Meja Kerja Kayu	85	-	85

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
17	Kursi Besi/Metal	53	-	53
18	Kursi Kayu	40	-	40
19	Sice	7	-	7
20	Meja makan kayu	1	-	1
21	Kursi Fiber Glas/Plastik	53	-	53
22	Partisi	1	-	1
23	Meubel Air Lainnya	2	-	2
24	Lemari Es	4	-	4
25	AC Window	11	-	11
26	AC Split	6	-	6
27	Kipas Angin	10	-	10
28	Televisi	8	-	8
29	Sound System	1	-	1
30	Camera Video	3	-	3
31	Dispenser	8	-	8
32	DVD Player	2	-	2
33	Voice Recorder	3	-	3
34	Alat Pemanas Processing (Water Heater)	2	-	2
35	Layar Film Projector	3	-	3
36	Pesawat Telephone	6	-	6
37	Faksimile	2	-	2
<b>II Pusat Penyuluhan</b>				
1	Jeep	1	-	1
2	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	11	-	11
3	Sepeda Motor (Penyuluh Kab/Kota)	1.816	-	1.816
4	Lori Dorong	1	-	1
5	Lemari Penyimpan	1	-	1
6	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2	-	2
7	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	-	2
8	Lemari Besi/Metal	17	-	17
9	Rak Kayu	9	-	9
10	Filing Cabinet Besi	5	-	5
11	Brandkas	5	-	5
12	Kardex Besi	15	-	15
13	Papan Visual/Papan Nama	1	-	1
14	White Board	4	-	4
15	Copy Board/Elektrik White Board	1	-	1
16	Peta	2	-	2
17	Alat Penghancur Kertas	1	-	1
18	Globe	1	-	1
19	Mesin Absensi	2	-	2
20	Alat Pemotong Kertas	1	-	1
21	Headmachine Besar	1	-	1
22	Overhead Projector	2	-	2
23	Panel Pameran	1	-	1
24	Laser Pointer	3	-	3
25	LCD Projector/Infocus	2	-	2
26	Meja Kerja Kayu	68	-	68

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
27	Kursi Besi/Metal	83	-	83
28	Sice	6	-	6
29	Lemari Es	2	-	2
30	Televisi	1	-	1
31	Wireless	3	-	3
32	Tustel	11	-	11
33	Dispenser	1	-	1
34	Handy Cam	7	-	7
35	DVD Player	2	-	2
35	Disc Record Player	1	-	1
36	Blitzzer	4	-	4
37	Camera Electronic	1	-	1
38	Video Caption Adder	1	-	1
39	Slide Projector	1	-	1
40	Camera Digital	5	-	5
41	Duplicator DVD	1	-	1
42	GPS Receiver	5	-	5
43	Telephone (PABX)	1	-	1
44	Intermediate Telephone/Key Telephone	5	-	5
45	Faksimile	1	-	1
46	Refrigerator	1	-	1
47	Tape Recorder	2	-	2
48	P.C Unit	56	-	56
49	Laptop	15	-	15
50	Note Book	18	-	18
51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	-	23
52	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	-	7
<b>III Pusat Perencanaan Pengembangan SDM</b>				
1	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	7	-	7
2	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	1	-	1
3	Sepeda Motor	4	-	4
4	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	-	1
5	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	-	1
6	Lemari Besi/Metal	11	-	11
7	Lemari Kayu	2	-	2
8	Rak Kayu	1	-	1
9	Filing Cabinet Besi	1	-	1
10	Brandkas	1	-	1
11	Kardex Besi	1	-	1
12	White Board	3	-	3
13	Alat Penghancur Kertas	2	-	2
14	LCD Projector/Infocus	2	-	2
15	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	-	2
16	Meja Kerja Kayu	15	-	15
17	Kursi Besi/Metal	30	-	30
18	Meja Rapat	1	-	1
19	Meubelair lainnya	1	-	1
20	AC Window	3	-	3

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
21	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	-	2
22	Televisi	2	-	2
23	Megaphone	3	-	3
24	Dispenser	2	-	2
25	Handy Cam	2	-	2
26	Voice Recorder	3	-	3
27	Faksimile	1	-	1
28	Serial Scanner/Printer	6	-	6
29	Kamera Digital	4	-	4
30	P.C Unit	17	-	17
31	Laptop	11	-	11
32	Note Book	1	-	1
33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	-	5
34	Voice Recorder	3	-	3
35	Software Komputer	2	-	2
<b>IV Pusat Diklat SDM LHK</b>				
1	Ruang Kelas:	10	-	10
2	Ruang Diskusi	3	-	3
3	Ruang Makan	1	-	1
4	Aula	1	-	1
5	Asrama	1	-	1
6	Perpustakaan	1	-	1
7	Media Center	1	-	1
8	Tempat Ibadah (Mesjid)	1	-	1
9	Laboratorium Bahasa Inggris dan Komputer	2	-	2
11	Rumah Dinas	1	-	1
12	Sarana Olah raga	3	-	3
13	Gedung Kantor	1	-	1
14	Kendaraan Roda 6	3	-	3
15	Kendaraan Roda 4	13	-	13
16	Kendaraan Roda 2	6	-	6
17	Pick Up	1	-	1
18	Mobil Patroli	1	-	1
19	P.C. Komputer	150	46	196
20	LCD Projector	20	12	32
21	Camera Digital	18	5	23
22	voice recorder	0	2	2
23	Printer	133	25	158
<b>V PUSAT Latmas dan PGL</b>				
1	Asrama Permanen	1	0	1
2	Micro Bus,Mini Bus	8	1	9
3	Sepeda Motor, Sepeda	11	0	11
4	Automatic Emergency Lighting	40	0	40
5	Mesin Fotocopy Lainnya	2	1	3
6	Lemari Besi/Metal,Kayu	138	2	140
7	Rak Besi, Rak Kayu	9	1	10
8	Filing Cabinet Besi,Kayu	9	1	10
9	Tabung Pemadam Api, Hydrant	10	0	10

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
10	CCTV - Camera Control Television System	3	0	3
11	Papan Visual/Papan Nama	2	0	2
12	White Board	8	1	9
13	Copy Board/Elektrik White Board	2	0	2
14	Alat Penghancur Kertas	6	4	10
15	Mesin Laminating	2	1	3
16	LCD Projector/Infocus	15	2	17
17	Flip Chart	9	0	9
18	Meja Kerja Besi/Metal,Kayu	192	11	203
19	Kursi Besi/Metal,Kayu	327	125	452
20	Meja Rapat, Komputer,Makan Kayu	39	16	55
21	Tempat Tidur Besi, Kayu	57	0	57
22	Meja Telepon,Resepsionis,Marmer	7	0	7
23	Kasur/Spring Bed	60	0	60
24	Nakas, Jam Mekanis	64	8	72
25	Mesin Cuci	1	1	2
26	A.C. Sentral, A.C. Split	46	7	53
27	Exhause Fan, Cold Room Frezzer	35	2	37
28	Treng Air/Tandon Air	2	0	2
29	Televisi, Sound System	15	0	15
30	Wireless	2	7	9
31	Microphone, Mic Conference	12	1	13
32	Dispenser	4	6	10
33	Mimbar/Podium	2	0	2
34	Handy Cam,Karpet	2	3	5
35	Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )	394	100	494
36	Microphone/Wireless MIC	1	2	3
37	Power Amplifier	2	0	2
38	Microphone Cable	2	0	2
39	Camera Electronic	0	1	1
40	Video Monitor,Rak Peralatan	3	6	9
41	Layar Film/Projector	7	0	7
42	LCD Monitor,Telephone (PABX)	4	0	4
43	Pesawat Telephone,Facsimile	46	19	65
44	Bantal Angin/Wind Ring	70	0	70
45	Alat Kesehatan Olah Raga Lainnya	4	2	6
46	Alat Kesehatan Umum Lain Lainnya	1	0	1
47	Personal Computer,Grafic Printer PR01	4	0	4
48	P.C Unit,Lap Top, Note Book	77	71	148
49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	22	40
50	Server,Router,Modem	7	7	14
51	Helmet, Alat Tennis Meja	46	0	46



# 2

## PERENCANAAN KINERJA



## A. Rencana Strategis (Renstra) Badan P2SDM Tahun 2015-2019

### 1. Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu "Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia; dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman; serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional".

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut dirumuskan sasaran strategis Kementerian LHK Tahun 2015-2019, yaitu:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6 pada tahun 2019 berdasarkan baseline tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBPN. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencapai sasaran strategis tersebut pada Tahun 2016 yaitu:

1. Mendorong dan mensinergikan pengelolaan ditingkat tapak lingkungan dan hutan
2. Meningkatkan kapasitas birokrasi, diantaranya penguatan regulasi, penyediaan dan pemanfaatan hasil iptek dan meletakkan setiap upaya pembangunan Kementerian ke dalam konteks pembangunan nasional, serta mendorong budaya kinerja untuk memperbaiki kondisi tapak lingkungan dan hutan.
3. Meningkatkan modal sosial pembangunan Kementerian dan kepercayaan publik serta menggali kemungkinan kerjasama pemerintah dan swasta.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditetapkan program-program sebagai berikut:

1. Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
2. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
3. Program Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan;
4. Program Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan;
5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
6. Program Pengendalian Perubahan Iklim;
7. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Program Planologi dan Tata Lingkungan;
10. Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan;
11. Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
12. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK;

## 2. Sasaran Strategis Badan P2SDM

Seluruh program kerja yang telah dirancang dan akan dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode Tahun 2015-2019 akan dapat terwujud sesuai tujuan “jika dan hanya jika” didukung oleh ketersediaan SDM yang cukup dan kualitas yang memadai sesuai dinamika dan tantangan kekinian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Berangkat dari hal tersebut Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM melalui Rencana Strategis Badan P2SDM memiliki sasaran program yaitu “Meningkatnya daya saing SDM LHK”. Gambaran keterkaitan Sasaran Strategis Kementerian LHK dengan Sasaran Program Badan P2SDM dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Hubungan Sasaran Strategis Kementerian LHK dengan Sasaran Badan P2SDM Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program
Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup secara Lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (S2)	Peningkatan kontribusi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBPN sebagai masukan terhadap PDB Nasional	Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan negara (S2.P5)	Jumlah SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang meningkat kompetensinya bertambah setiap tahun untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan negara (S2.P5.IKP)
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)	Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun	Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem (S3.P5)	Jumlah SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang meningkat kompetensinya bertambah setiap tahun untuk mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem (S3.P5.IKP)

## B. Indikator Kinerja Program (IKP) / Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan P2SDM Tahun 2015-2019

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Berdasarkan sasaran program yang telah disusun, Badan P2SDM menetapkan Target Indikator Kinerja Program (IKP) atau Indikator Kinerja Kegiatan (IKU) Badan P2SDM

Tahun 2015 – 2019 yang merupakan ukuran keberhasilan dari kinerja organisasi Badan P2SDM. Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019, IKP/IKU Badan P2SDM Tahun 2015 – 2019 secara detil disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Indikator Kinerja Program Badan P2SDM Tahun 2015-2019

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2015-2019
Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	• Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	• Jumlah Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Yang Meningkatkan Kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan Koperasi.
Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	• Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	• Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Tingkat Tapak, Dan SDM LHK Kompeten, 25.400 orang. • Jumlah SDM LHK Meningkatkan Kapasitasnya, 57.640 orang. • Jumlah Generasi Lingkungan Meningkatkan Kapasitasnya, 71.200 Orang, dan 5.000 Unit Sekolah/Kampus yang Berbudaya LH.

### C. Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan P2SDM Tahun 2016

#### 1. Strategi Pencapaian Sasaran Program Badan P2SDM Tahun 2016

Dalam rangka pencapaian sasaran program Tahun 2016, Badan P2SDM melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a) Memberikan pendampingan bagi kelompok masyarakat untuk meningkatkan produksi barang dan jasa dari hutan serta meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dalam pemanfaatan hutan secara lestari untuk mendukung keberadaan industri dan kreatif berbasis sumberdaya hutan.

- b) Mendukung penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten dalam operasionalisasi KPH, peningkatan kapasitas SDM baik aparatur maupun non aparatur serta melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap lingkungan.

## **2. Program dan Kegiatan**

Sesuai tugas dan fungsi organisasi Badan P2SDM, maka seluruh aktivitas kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang akan dilaksanakan unit organisasi Badan P2SDM selama periode Tahun 2015 – 2019 ditampung dalam rancangan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Untuk mewujudkan program Badan P2SDM yang sejalan dengan sasaran strategis Kementerian LHK, disusunlah sasaran strategis dan sasaran program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Penjabaran program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM diimplementasikan dalam 6 (enam) butir kegiatan utama, meliputi:

- a. Perencanaan dan Pengembangan SDM;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan;
- d. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan;
- e. Peningkatan Penyuluhan;
- f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Badan P2SDM.

## **3. Target Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan P2SDM Tahun 2016**

Rencana Kerja (Renja) Badan P2SDM Tahun 2016 merupakan instrumen dasar untuk kerangka kerja program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2016. Dokumen Renja/RKT Badan P2SDM Tahun 2016 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan/usulan rencana kerja dan anggaran seluruh satuan kerja unit Badan P2SDM Tahun 2016.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2016, Badan P2SDM menetapkan target Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016 sebagaimana disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Target Indikator Kinerja Program (IKP) Badan P2SDM Tahun 2016

Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2015-2019	Target 2016
Jumlah Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Yang Meningkatkan Kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan Koperasi.	5.500 Unit KTH	472 Unit KTH
Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan Dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Tingkat Tapak, Dan SDM LHK Kompeten, 25.400 orang.	25.400 Orang	1.100 Orang
Jumlah SDM LHK Meningkatkan Kapasitasnya, 57.640 orang.	57.640 Orang	4.675 orang
Jumlah Generasi Lingkungan Meningkatkan Kapasitasnya, 71.200 Orang, dan 5.000 Unit Sekolah/Kampus Yang Berbudaya LH.	71.200 Orang 5.000 Unit Sekolah/Kampus	3.900 orang 700 Unit Sekolah/Kampus

Target tersebut diatas akan dicapai melalui 6 (enam) kegiatan pada lingkup Badan P2SDM dimana setiap kegiatan memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan target pencapaian kinerja pada Tahun 2016 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan P2SDM Tahun 2016

Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
5444	<b>Peningkatan Penyuluhan</b>  Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat</i>	a) Jumlah Kelas Kelompok Tani Desa-Desa Hutan dari Tingkatan Pemula ke Madya, 450 KTH b) Jumlah Koperasi KTH yang Dibentuk, 22 unit c) Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 15 unit d) Jumlah Tenaga Pendamping Handal Bagi KTH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa-Desa Hutan, 450 orang
5440	<b>Perencanaan dan Pengembangan SDM</b>	a) Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Pengelola KPH, 600 orang

Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
	Sasaran: <i>Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK Kompeten</i>	b) Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya 500 orang
5441	<b>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK</b>  Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas SDM LHK</i>	a) Jumlah Kapasitas SDM Aparatur LHK Yang Meningkatkan Kapasitasnya 2.885 Orang b) Jumlah SDM LHK yang Lulus Pendidikan Karya Siswa (S2 dan S3), 40 orang c) Jumlah KHDTK Sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan, 2 unit KHDTK d) Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan yang Meningkatkan Kapasitasnya, 600 orang e) Jumlah Tenaga Pendamping KTH dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa-Desa Hutan Meningkatkan Kapasitasnya, 450 orang
5442	<b>Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan</b>  Sasaran: <i>Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan</i>	Jumlah Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan sebanyak 700 orang
5443	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan</b>  Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan</i>	a) Jumlah Kader Lingkungan Hidup Meningkatkan Kapasitasnya, 400 orang b) Jumlah Generasi Muda LH Meningkatkan Kapasitasnya, 1.000 orang c) Jumlah Sekolah/Kampus Yang Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) 700 Unit Sekolah/Kampus d) Jumlah Anggota Saka Kalpataru Peduli Dan Berbudaya LH, 2.500 orang
5439	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</b>  Sasaran: <i>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</i>	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk Menjamin Kinerja yang Optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 81,00 (A) di Tahun 2016.

#### 4. DIPA Badan P2SDM Tahun Anggaran 2016

Dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2016, telah diterbitkan DIPA APBN-P BA.029 Unit Badan P2SDM Tahun Anggaran (TA) 2016 dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 360.838.691.000,- (tiga ratus enam puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Sumber dana DIPA tersebut terdiri Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.315.838.691.000,- (87,53%), dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 45.000.000.000,- (12,47%).

Alokasi pagu anggaran Badan P2SDM Tahun 2016 yang tercantum di atas kemudian mengalami pemotongan anggaran pada bulan Agustus 2016 menjadi Rp.345.691.545.000,-. (tiga ratus empat puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) Perubahan anggaran tersebut karena terdapat penghematan anggaran pada seluruh Kementerian dan lembaga yang berakibat penurunan anggaran APBN-P pada Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Rincian perubahan anggaran APBN-P sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11. Alokasi Pagu Anggaran APBN dan APBN-P Tahun 2016 Per Kegiatan

*Dalam ribuan rupiah*

No	Kode	Nama Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	
			APBN	APBN-P
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	360.838.691	345.691.545
1	5444	Peningkatan Penyuluhan	20.699.000	18.547.053
2	5440	Perencanaan dan Pengembangan SDM	66.628.000	65.697.772
3	5441	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	146.565.000	143.413.100
4	5442	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	77.453.691	71.768.547
5	5443	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	18.428.000	16.928.076.
6	5439	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	31.065.000	29.336.997

Pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan, pagu anggaran Badan P2SDM bertambah menjadi sebesar Rp. 348.061.545.000,- (tiga ratus empat puluh delapan milyar enam puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Kenaikan tersebut akibat adanya penambahan pagu pada Satker Sekretariat Badan P2SDM akibat kekurangan anggaran untuk belanja gaji pegawai dari lintas program dan satker serta adanya tambahan dana hibah pada SMK Kehutanan Negeri Samarinda. Anggaran tersebut tidak seluruhnya dapat digunakan karena adanya Instruksi Presiden Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016. Besarnya anggaran yang harus dihemat oleh Badan P2SDM yaitu Rp.13.624.030.000,- dengan rincian sebagaimana berikut Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Pagu Anggaran dan *Self Blocking* Badan P2SDM Tahun 2016

No	Kode	Nama Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	
			APBN-P	<i>Self Blocking</i>
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	348.061.545.000	13.624.030.000
1	5444	Peningkatan Penyuluhan	18.247.053.000	1.500.000.000
2	5440	Perencanaan dan Pengembangan SDM	65.529.772.000	1.347.770.000
3	5441	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	143.177.100.000	5.808.640.000
4	5442	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	72.278.547.000	0
5	5443	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	16.341.076.000	2.258.320.000
6	5439	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	32.487.997.000	2.709.300.000

### D. Perjanjian Kinerja (PK)

---

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Badan P2SDM telah menyusun Perjanjian Kinerja Badan P2SDM Tahun 2016 yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan P2SDM dan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Bulan Desember Tahun 2015 sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.



Gambar 2. Foto bersama Kepala Badan dengan Kepala Pusat Lingkup Badan P2SDM setelah penandatanganan Perjanjian Kinerja

Akibat adanya pengurangan alokasi anggaran pada APBN-P Badan P2SDM Tahun 2016 dan beberapa kesalahan administrasi, pada Bulan Desember 2016, Kepala Badan P2SDM menyampaikan nota dinas kepada Menteri LHK untuk persetujuan revisi Perjanjian Kinerja Badan P2SDM sebagaimana pada Lampiran 2. Rincian target Perjanjian Kinerja Badan P2SDM Tahun 2016 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Perjanjian Kinerja Badan P2SDM tahun 2016

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara	Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara	Jumlah Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Meningkatkan Kapasitasnya 472 unit KTH
2	Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem	Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem	Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Tingkat Tapak, dan SDM LHK Kompeten, 1.100 orang. Jumlah SDM LHK Meningkatkan Kapasitasnya 4.675 orang Jumlah Generasi Lingkungan Meningkatkan Kapasitasnya 3.900 Orang dan 700 Unit Sekolah/Kampus yang Berbudaya Lingkungan

Adapun dukungan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja diatas sebesar RP. 348.061.545.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja Badan P2SDM tahun 2016

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan dan Pengembangan SDM	Rp. 65.529.772.000
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK	Rp. 143.177.100.000
3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Rp. 72.278.547.000
4. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Rp. 16.341.076.000
5. Peningkatan Penyuluhan	Rp. 18.247.053.000
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM	Rp. 32.487.997.000





# 3

## AKUNTABILITAS KINERJA



## A. Capaian Kinerja Organisasi

### 1. Reviu atas Dokumen Perencanaan

Dalam rangka efisiensi/pemotongan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 sesuai dengan surat Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.247/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Penghematan atau Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun anggaran 2016, terdapat pengurangan anggaran Badan P2SDM Tahun 2016 dari Rp. 360.838.691.000,- (tiga ratus enam puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp. 345.691.545.000,- (tiga ratus empat puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Sejalan dengan efisiensi/pemotongan anggaran tersebut Badan P2SDM melakukan reviu terhadap target rencana kerja Badan P2SDM Tahun 2016 sehingga terdapat beberapa penurunan target kinerja kegiatan sebagaimana Tabel 15 berikut:

Tabel 15. Perubahan Target IKK Badan P2SDM

No	Kegiatan	Nama Indikator Kinerja Kegiatan	Target Awal	Target Revisi
1.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK	Jumlah Kapasitas SDM Aparatur LHK yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.890 Orang	2.885 Orang
2.	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Jumlah Kader Lingkungan Hidup Meningkatkan Kapasitasnya Jumlah Anggota Saka Kalpataru Peduli dan Berbudaya LH	500 Orang 3.000 Orang	400 Orang 2.500 Orang

Dengan adanya revisi tersebut, Kepala Badan P2SDM meminta persetujuan pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merevisi Perjanjian Kinerja melalui Nota Dinas Nomor: ND. 167/P2SDM/SET/REN.3/12/2016 tentang Persetujuan Revisi Perjanjian Kinerja Badan P2SDM Tahun 2016.

Dalam rangka penghematan pelaksanaan APBN-P TA 2016, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN-P Tahun Anggaran 2016 dengan poin penting sebagai berikut:

1. Dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2016, masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun anggaran 2016 yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blocking mandiri (*self blocking*).
2. Pemotongan anggaran dilakukan utamanya terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, langganan daya dan jasa, biaya rapat, operasional perkantoran lainnya serta kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya.

Akibat adanya penghematan anggaran secara mandiri sebesar Rp.13.624.030.000,-, terdapat beberapa kegiatan yang terkait Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Badan P2SDM tidak dapat dilaksanakan seperti:

1. Pelaksanaan pelatihan Kader LH di Provinsi Sumatera Selatan
2. Pelatihan perilaku ramah lingkungan bagi SMA/Sederajat di Indramayu
3. Pelatihan Pengenalan Saka Kalpataru di Jawa Timur
4. Pendidikan dan pelatihan tenaga pendamping KTH di Kupang
5. Pendidikan dan Pelatihan rehabilitasi kawasan mangrove di Rumpin
6. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kebakaran Hutan di Rumpin
7. Pendidikan dan Pelatihan Pengenalan Jenis Rotan di Rumpin
8. Pendidikan dan pelatihan Calon KKPHP di Bogor
9. Pendidikan dan Pelatihan Internalisasi Revolusi Mental bagi Pejabat Eselon III dan IV di Bogor

## 2. **Reviu Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Laporan Kinerja Tahun 2015**

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2015 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencakup 5 komponen manajemen kinerja yaitu : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Hasil evaluasi Badan P2SDM Tahun 2015 mendapat nilai 90,60 atau **AA (sangat memuaskan)**. Hasil evaluasi SAKIP Badan P2SDM Tahun 2015 disajikan pada Tabel 16 .

Tabel 16. Hasil Evaluasi SAKIP Badan P2SDM Tahun 2015

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,72
2.	Pengukuran Kinerja	25	24,25
3.	Pelaporan Kinerja	15	15,00
4.	Evaluasi Kinerja	10	10,00
5.	Capaian Kinerja	20	15,63
Total		100	<b>90,60</b>
Kategori SAKIP		AA	Sangat Memuaskan

Hasil evaluasi SAKIP Badan P2SDM Tahun 2015 dikategorikan sangat memuaskan, namun masih terdapat beberapa kelemahan pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja serta capaian kinerja. Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian LHK terhadap kelemahan tersebut antara lain :

### a. melakukan

- 1) Koordinasi dengan Sekretaris Jenderal dalam rangka penyelarasan terhadap perbedaan target indikator kinerja antara yang ditetapkan dalam Renstra BP2SDM dengan Renstra Kementerian LHK.
- 2) Perbaiki perbedaan penetapan target indikator tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya dan jumlah pendidikan siswa SMK Kehutanan antara Renja 2016 BP2SDM dan Renstra BP2SDM

- b. memerintahkan Kepala Pusat Diklat SDM LHK untuk melakukan perbaikan terhadap perbedaan target total (2015-2019) pencapaian indikator kinerja “pengelolaan KHDTK” dan “jumlah SDM LHK yang lulus karyawan” antara dokumen Renja Tahun 2015 Pusdiklat SDM LHK, Renstra Pusdiklat SDM LHK dengan Renstra BP2SDM dan Renstra Kementerian LHK.

Semua hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian LHK terhadap kelemahan SAKIP Badan P2SDM Tahun 2015 sudah ditindaklanjuti. Tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal KLHK antara lain:

- a. Badan P2SDM telah berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal terkait penyelarasan target indikator Renstra dengan mengirimkan surat Kepala Badan P2SDM Nomor S.118/P2SDM/SET/REN.0/5/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Permohonan penyesuaian target renstra Kementerian LHK sebagaimana pada lampiran 11.
- b. Badan P2SDM telah menyesuaikan target pada Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2016 sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal yaitu Target Indikator Kinerja tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya menjadi sebanyak 600 orang dan jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan menjadi sebanyak 700 orang sesuai dengan target pada Renstra Badan P2SDM Tahun 2015-2019 sebagaimana pada lampiran 12.
- c. Kepala Badan P2SDM telah memerintahkan Kepala Pusat Diklat SDM LHK untuk melakukan revisi pada Rencana Strategis Pusat Diklat SDM LHK pada saat Rapat Pimpinan bulanan lingkup Badan P2SDM. Kepala Pusat Diklat SDM LHK telah memperbaiki target pencapaian indikator kinerja “pengelolaan KHDTK” dan Jumlah SDM LHK yang lulus karyawan” pada Renja dan Renstra Pusdiklat sesuai dengan Renstra BP2SDM data sebagaimana pada Lampiran 13.

### 3. Metode Pengukuran

Metode Pengukuran Capaian Kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase capaian kinerja, meliputi kinerja fisik, kinerja keuangan, serta tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan capaian kinerja.

#### a. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian rencana dan/atau keberhasilan penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Hasil dari Pengukuran Capaian Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Dalam melakukan Pengukuran Capaian Kinerja digunakan formulasi Pengukuran Capaian Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persen capaian kinerja tahun berjalan dengan persen capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya.

$$\text{Efektivitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian kinerja fisik tahun berjalan}}{\% \text{ Capaian kinerja Fisik tahun sebelumnya}}$$

Rasio yang dihasilkan  $> 1$  berarti terjadi peningkatan efektivitas, rasio yang dihasilkan  $= 1$  maka efektivitas capaian kinerja tahun berjalan adalah tetap atau sama dengan tahun sebelumnya, sedangkan bila rasio yang dihasilkan  $< 1$  menunjukkan efektivitas capaian kinerja sasaran yang menurun, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun periode Renstra.

Efisiensi Capaian Kinerja sasaran Tahun 2015 dilakukan melalui perbandingan antara capaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran Tahun 2015. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui Efisiensi Capaian Kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2015.

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian kinerja fisik tahun berjalan}}{\% \text{ Capaian keuangan tahun berjalan}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan  $> 1$  maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan  $< 1$  menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

#### **b. Evaluasi Kinerja**

Berdasarkan perhitungan Pengukuran Capaian Kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian pada setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di waktu yang akan datang sehingga sasaran dalam jangka waktu lima tahun yang tertuang dalam rencana strategis Tahun 2015-2019 dapat tercapai.

Evaluasi dilakukan dengan melakukan pengukuran tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Selain itu juga, evaluasi dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.

#### **c. Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan kinerja dengan program dan kebijakan dalam sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan apabila memungkinkan dilakukan evaluasi kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

### **4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016**

Pengukuran Kinerja Badan P2SDM didasarkan pada komponen pengukuran capaian kinerja, efektivitas capaian kinerja dan efisiensi capaian kinerja.

### a. Pengukuran Capaian Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 dan Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kerja Tahunan Tahun 2016, terdapat 4 (empat) target Indikator Kinerja Program. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan P2SDM dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Utama. Hasil pengukuran rata-rata kinerja Badan P2SDM pada Tahun 2016 adalah sebesar **100,66%**. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan rata-rata kinerja tahun 2015 yaitu sebesar **92,97 %** sehingga dapat disimpulkan kinerja Badan P2SDM pada Tahun 2016 meningkat dan efektif. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Badan P2SDM Tahun 2016

Program	Sasaran	Target Indikator Kinerja Program (Ikp) 2015 - 2019	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	% Capaian
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan negara (S2.P5)	1) Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya 5.500 unit	472 Unit KTH	474 Unit KTH	100,42
	Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem (S3.P5)	2) Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang.	1.100 orang	1.224 orang	111,27
		3) Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya 57.640 orang	4.675 orang	4.652 orang	99,51
		4) Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya 71.200 orang dan 5.000 Unit Sekolah/Kampus yang berbudaya lingkungan	3.900 orang  700 Unit Sekolah/ Kampus	3.198 orang  706 Unit Sekolah/ Kampus	82,00  100,86
Rata-rata Kinerja Badan P2SDM					<b>100,66</b>

### b. Efektivitas Capaian Kinerja

Hasil pengukuran efektivitas capaian kinerja Badan P2SDM Tahun 2016 merupakan perbandingan capaian kinerja Tahun 2016 dengan capaian kinerja Tahun 2015. Efektivitas kinerja Tahun 2016 disajikan sebagaimana Tabel 18.

Tabel 18. Efektivitas Capaian Kinerja Badan P2SDM Tahun 2016

Program	Sasaran	Target Indikator Kinerja Program (IKP) 2015 - 2019	% Capaian		Efektivitas
			Tahun 2015	Tahun 2016	
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan negara (S2.P5)	1) Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya 5.500 unit	63,07	100,42	1,59
		2) Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang.	107,96	111,27	1,03
		3) Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya 57.640 orang	109,19	99,51	0,91
		4) Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya 71.200 orang dan 5.000 Unit Sekolah/Kampus yang berbudaya lingkungan	91,41	82,00	0,90
<b>Rata-rata Efektivitas Kinerja Badan P2SDM</b>			<b>92,97</b>	<b>100,66</b>	<b>1,08</b>

Berdasarkan Tabel diatas, Badan P2SDM telah berkkerja efektif hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata efektivitas Kinerja > 1 yaitu 1,08, namun terdapat beberapa indikator kinerja yang masih belum efektif dan perlu dioptimalkan untuk tahun anggaran berikutnya.

### c. Efisiensi Capaian Kinerja

Hasil pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Badan P2SDM Tahun 2016 sebagaimana disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Badan P2SDM Tahun 2016

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2016 (%)	Realisasi anggaran 2016 (%)	Efisiensi Capaian Kinerja
Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan negara (S2.P5)	1) Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya 5.500 unit	100,42	91,62	1,10
Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem (S3.P5)	2) Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang.	111,27	97,94	1,14
	3) Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya 57.640 orang	99,51	96,30	1,03
	4) Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya 71.200 orang dan 5.000 Unit Sekolah/Kampus yang berbudaya lingkungan	82,00 100,86	85,76 86,03	0,96 1,17
<b>Rata-rata Efisiensi Kinerja Badan P2SDM</b>		<b>100,66</b>	<b>95,40</b>	<b>1,06</b>

Tabel 19. menunjukkan bahwa rasio efisiensi indikator kinerja program berada pada nilai 1,06. Dengan demikian, Badan P2SDM pada Tahun 2016 secara keseluruhan memiliki kinerja yang baik, penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja telah efisien. Nilai efisiensi pada Tahun 2016 meningkat dibandingkan dengan efisiensi tahun lalu sebesar 1,01 yang berarti penggunaan sumber daya pada Tahun 2016 lebih efisien dibandingkan Tahun 2015.

#### d. Progres Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2016 terhadap Target Renstra 2015 - 2019

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2016 dengan target Renstra diperoleh dengan cara membandingkan rata-rata realisasi setiap Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Utama Badan P2SDM pada tahun 2016 terhadap target Renstra yaitu sebesar 19,25 %. Capaian kinerja Tahun 2016 serta hasil pengukuran rasio realisasi kinerja pada Tahun 2016 sebagaimana disajikan pada Tabel 19.

Tabel 20. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Badan P2SDM Tahun 2016 Terhadap Renstra Tahun 2015 – 2019

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2015-2019	Realisasi Per Tahun		Realisasi s.d 2016	% Progres
				2015	2016		
Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan negara (S2.P5)	1) Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya 5.500 unit	Unit KTH	5.500	345	474	819	14,89
Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem (S3.P5)	2) Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang.	orang	25.400	2.412	1.224	3.636	14,31
	3) Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya 57.640 orang	orang	57.640	10.003	4.652	14.655	25,44
	4) Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya 71.200 orang dan 5.000 Unit Sekolah/Kampus yang berbudaya lingkungan	orang	71.200	9.397	3.198	12.595	17,69
		Unit Sekolah/ Kampus	5.000	643	706	1.349	26,98
Rata-rata Capaian Kinerja Badan P2SDM terhadap Renstra Tahun 2015-2019							19,25

## 5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2016 pada Badan P2SDM dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

Indikator Kinerja 1 :	Jumlah Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Meningkatkan Kapasitasnya, 472 unit KTH dan Koperasi.
-----------------------	---

---

Pelaku utama merupakan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, beserta keluarga intinya dan pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kehutanan dan yang berkaitan dengan bidang kehutanan.

Program pendampingan pembentukan koperasi Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan salah satu bentuk usaha nyata pemerintah dalam menumbuhkembangkan KTH dalam bentuk koperasi yang bergerak di bidang usaha/bisnis kehutanan dan didirikan oleh pelaku utama kehutanan. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan ekonomi usaha petani hutan dalam bentuk Koperasi KTH yang baik diharapkan akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh akses sumber daya pasar, modal, teknologi dan pemasaran maupun kemitraan. Melalui Koperasi KTH tersebut, diharapkan Kelompok akan tumbuh dan berkembang sehingga memiliki daya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kelompok tani hutan pada Tahun 2016, Badan P2SDM merencanakan peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) sebanyak 450 unit KTH dan memfasilitasi pembentukan koperasi KTH untuk mengembangkan usahanya dalam komoditas kehutanan sebanyak 22 unit KTH. Rencana dan realisasi Indikator kinerja 1 disajikan sebagaimana Tabel 21.

Tabel 21. Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2016

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya.	472 Unit KTH	474 Unit KTH	100,42

Capaian indikator kinerja "jumlah Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Meningkatkan Kapasitasnya" pada Tahun 2016 terealisasi sejumlah 474 unit KTH dari target 472 unit KTH atau sebesar 100,42%. Capaian tersebut terdiri dari meningkatnya kelas KTH dari pemula ke madya difasilitasi melalui dana dekonsentrasi sebanyak 255 unit KTH dan dampak dari kebijakan pemerintah daerah sebanyak 195 unit KTH serta Koperasi KTH sebanyak 24 unit.

Capaian koperasi KTH sebanyak 24 unit terdiri dari 22 unit KTH dan 2 unit Bank Sampah berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Nomor SK.42/LUH/KP/PPSDM.0/5/2016 tanggal 25 Mei 2017 tentang Penetapan Kelompok Tani Hutan dan Bank Sampah. Rincian peningkatan kelas KTH dan Pembentukan Koperasi KTH disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22. Rincian Peningkatan Kelas KTH dan Pembentukan Koperasi KTH

No	Output Kegiatan	Target (orang)	Realisasi (orang)	%	Keterangan
1	Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya	450	450	100,00	Kenaikan KTH dari dana Dekon 255 KTH dan dampak regulasi 195 KTH
2	Jumlah koperasi KTH yang dibentuk	22	24	109,09	Koperasi yang berbadan hukum 22 KTH dan Bank sampah 2 unit
	Jumlah	472	474	100,42	

*"Peningkatan Kelas KTH dalam rangka meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan hutan"*



Gambar 3. Peningkatan Kelas KTH

Pelaksanaan peningkatan kelas KTH melalui dana dekonsentrasi dilaksanakan pada 25 provinsi di Indonesia sedangkan kenaikan kelas KTH dampak dari regulasi terdapat pada 24 provinsi di Indonesia dengan rincian sebagaimana Tabel 23 dan secara lebih rinci pada lampiran 3-5.

Tabel 23. Rincian Peningkatan Kelas KTH dan Pembentukan Koperasi KTH

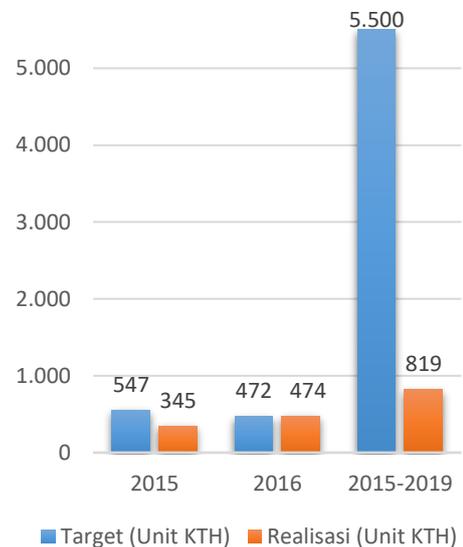
No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota	Kenaikan Kelas KTH Dana Dekon	Regulasi	Koperasi KTH Dana Pusat	Regulasi
1	Banten	3	16	-	-	-
2	Jawa Barat	13	10	88	4	1
3	Jawa Tengah	24	30	2	2	-
4	Jawa Timur	8	-	63	3	-
5	DI Yogyakarta	4	20	-	2	-
6	Aceh	8	9	2	1	-
7	Sumatera Utara	1	-	1	-	-
8	Sumatera Barat	9	11	1	1	1
9	Riau	5	4	4	-	-
10	Kep. Riau	1	-	1	-	-
11	Jambi	4	4	4	-	-
12	Bangka Belitung	4	8	1	-	-
13	Sumatera Selatan	5	2	5	-	-
14	Bengkulu	1	-	1	1	-
15	Lampung	7	14	-	2	-
16	Kalimantan Barat	4	2	5	1	-
17	Kalimantan Tengah	4	-	4	-	-
18	Kalimantan Selatan	6	7	4	1	-
19	Sulawesi Utara	11	13	1	1	-
20	Sulawesi Tengah	5	6	1	-	-
21	Sulawesi Selatan	13	15	-	-	-
22	Sulawesi Tenggara	7	17	1	-	-
23	Gorontalo	6	16	1	-	-
24	Sulawesi Barat	4	10	1	-	-
25	Maluku	1	4	-	-	-
26	Maluku Utara	5	8	1	-	-
27	Bali	6	7	1	1	-
28	NTB	9	9	1	2	-
29	NTT	2	10	1	-	-
30	Papua	3	3	-	-	-
<b>Total</b>			<b>255</b>	<b>195</b>	<b>22</b>	<b>2</b>

Persentase capaian kinerja pada Tahun 2016 meningkat dibandingkan capaian tahun lalu dari 63,07 % menjadi 100,42% sehingga nilai efektivitas capaian kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya sebesar 1,59. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pencapaian target Indikator Kinerja kegiatan ini telah berjalan lebih efektif dibandingkan tahun lalu.

Capaian Kinerja jumlah Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Meningkatkan Kapasitasnya di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

1. Adanya dukungan program dan anggaran dari pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat tentang pelaksanaan kenaikan kelas KTH.
2. Tingginya komitmen penyelenggara penyuluhan terhadap kegiatan penyuluhan Kehutanan di lapangan terutama pembinaan KTH.
3. Adanya Koordinasi yang baik antara Pusat Penyuluhan dengan penyelenggara penyuluhan di daerah dan pelaksana penyuluhan di provinsi/kabupaten/kota untuk meningkatkan kelas kelompok tani dari pemula ke madya;
4. Akses pasar komoditas Kehutanan makin mudah dijangkau oleh masyarakat di sekitar hutan.

Tahun 2016 merupakan tahun ke 2 pelaksanaan kegiatan ini, progres capaian sampai Tahun 2016 disajikan sebagaimana Gambar 5. Sampai dengan Tahun 2016, capaian Indikator kinerja jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya sebesar 819 unit KTH atau sebesar 14,89% dari target capaian Renstra. Nilai tersebut belum optimal untuk memenuhi target capaian selama 5 tahun hal ini disebabkan oleh Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja ini yaitu:



Gambar 4. Progres Capaian Indikator Kinerja 1 s.d Tahun 2016

1. Pelaksana kegiatan fasilitasi penyuluhan kehutanan melalui dana dekonsentrasi adalah Badan Koordinasi Penyuluhan/Dinas Kehutanan yang merupakan SKPD sehingga pengawasan dan evaluasi masih kurang.
2. Lemahnya pelaksanaan monitoring dan pelaporan kegiatan dana dekonsentrasi penyuluhan Kehutanan baik dari Satker Pengelola di Provinsi ke Pusat (Badan P2SDM) mengingat pengelolaan dana dekonsentrasi penyuluhan kehutanan berada di Sekretariat Jenderal cq Biro Perencanaan.

Sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dilakukan oleh Badan P2SDM agar hal tersebut tidak terulang di tahun 2017 yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Sekreariat Jenderal cq Biro Perencanaan dan Biro Keuangan serta penerima dana Dekonsentrasi (Bakorluh dan Dinas Kehutanan Provinsi) mengenai rencana pengusulan, revisi kegiatan, anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
2. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Bakorluh/Dinas Kehutanan provinsi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersumber dari dana dekonsentrasi.

**Output** yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu meningkatnya 450 KTH dari kelas pemula menjadi madya dan terbentuknya koperasi KTH sejumlah 24 Unit yang mengembangkan usahanya dalam komoditas kehutanan dalam bentuk koperasi. **Outcome** yang ditunjukkan dari capaian tersebut yaitu terwujudnya KTH yang memiliki kelembagaan yang kuat dan berjiwa usaha untuk mengembangkan komoditas yang dikelola dan diwujudkan dalam bentuk koperasi sehingga meningkatkan daya saing dan harga tawar produk KTH yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.



Gambar 5. Koperasi Kelompok Tani Hutan

Indikator Kinerja 2 : Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Tingkat Tapak, dan SDM LHK Kompeten, 1.100 orang

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai lembaga pengelola kawasan hutan tingkat tapak merupakan salah satu kebijakan strategis dalam pembangunan kehutanan. sebagai pengelola hutan di tingkat tapak, KPH mempunyai peran yang sangat strategis dalam konteks pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara nasional.

Tenaga Bakti Rimbawan dan SDM LHK kompeten dibentuk untuk memenuhi kebutuhan SDM Kehutanan berkualitas di tingkat tapak. Program Bakti Rimbawan merupakan program penyiapan tenaga profesional yang direkrut dari lulusan baru sarjana, diploma 3 kehutanan dan SMKK yang diharapkan dapat mendukung kegiatan pembangunan KPH. Tenaga Bakti Rimbawan tersebut diberikan pengalaman kerja langsung di lapangan dengan harapan dapat berkontribusi dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.



Gambar 6. Penyerahan rompi dan topi untuk tenaga bakti rimbawan Tahun 2016

SDM LHK yang kompeten diperoleh dengan melakukan uji kompetensi sertifikasi profesi SDM lingkungan hidup dan kehutanan untuk mengukur dan mengetahui kompetensi pada bidangnya. Sertifikasi juga diharapkan dapat menjamin bahwa presisi dan akurasi hasil kinerja SDM sesuai dengan target program pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, pada Tahun 2016 Badan P2SDM merencanakan penerimaan tenaga Bakti Rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten sebanyak 1.100 Orang yang terdiri dari tenaga Bakti Rimbawan sebanyak 600 orang dan Sumber Daya Manusia LHK yang kompeten sebanyak 500 orang. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja pada kegiatan ini disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 2 tahun 2016

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten	1.100 Orang	1.224 Orang	111,27

Capaian indikator kinerja sebesar 111,27% terdiri dari 600 orang tenaga bakti rimbawan dan 624 SDM LHK yang kompeten yang disajikan sebagaimana Tabel 25. Adapun penempatan tenaga bakti rimbawan secara rinci disajikan pada Lampiran 6 dan rincian pelaksanaan uji kompetensi SDM LHK Tahun 2016 disajikan pada Lampiran 7.

Tabel 25. Rekrutmen Tenaga Bakti Rimbawan dan SDM LHK Kompeten Tahun 2016

No	Output Kegiatan	Target (orang)	Realisasi (orang)	%	Keterangan
1	Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH,	600	600	100,00	Rekrutmen Tenaga Bakti Rimbawan Tahun 2016 terdiri dari sarjana 258 orang, Diploma 3 kehutanan 23 orang dan SMKK 319 orang dengan penempatan di 53 KPHK, 51 KPHL, 73 KPHP dan 1 Balai Diklat LHK
2	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	500	624	124,80	Sertifikasi Penyuluh 40 orang, Polhut 266 orang, PEH 260 orang dan SDM KPH 58 orang
	Jumlah	1.100	1.224	111,27	

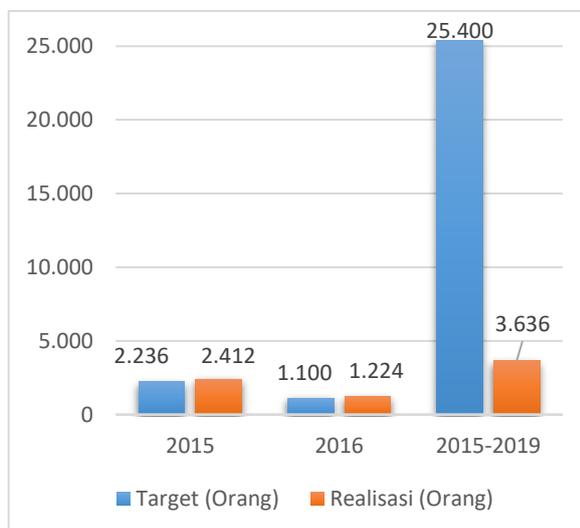
Jika dibandingkan dengan presentase capaian kinerja pada Tahun 2015, maka capaian kinerja pada Tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu dari 107,96% menjadi 111,27%. Peningkatan tersebut menghasilkan nilai efektivitas capaian kinerja sebesar 1,03 sehingga Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan Dan SDM LHK yang Kompeten dapat dikategorikan efektif. Pencapaian kinerja sebesar 111,27% ini didukung dengan penggunaan sumberdaya (anggaran) sebesar 97,94%, sehingga diperoleh nilai efisiensi capaian kinerja sebesar 1,14 yang berarti dapat dikategorikan efisien.

*"Tenaga Bakti Rimbawan mendukung peningkatan kinerja dan percepatan operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)"*



Gambar 7. Pengarahan Persiapan Praktek Lapangan pada tenaga bakti rimbawan

Capaian kinerja Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dan SDM LHK yang Kompeten sampai dengan Tahun 2016 terealisasi sebanyak 3.636 orang atau sebesar 14,31% dari target Renstra Badan P2SDM Tahun 2015-2019 sejumlah 25.400 orang. Progres capaian tersebut selengkapnya disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8. Progres capaian Indikator kinerja 2 s.d Tahun 2016

Progres capaian indikator kinerja tersebut di atas belum optimal. Hal ini disebabkan oleh:

1. Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk menampung peminat tenaga bakti rimbawan sesuai dengan kebutuhan.

2. Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan uji sertifikasi sesuai dengan permintaan daerah.
3. Belum tersedia LSP yang ada di daerah untuk melakukan uji kompetensi.
4. Belum ada kerjasama dengan pemerintah daerah dalam melakukan uji kompetensi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
5. Asesor yang tersedia dari sisi kuantitas belum memadai. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini baru memiliki  $\pm$  20 orang asesor yang telah mengikuti diklat asesor BNSP.

Upaya pemecahan masalah yang akan dilakukan oleh Badan P2SDM melalui Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM adalah sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya bakti rimbawan untuk mengisi tenaga KPH, perlu ada komitmen dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memenuhi sumberdaya yang dibutuhkan.
2. Mengusahakan penambahan jumlah formasi kebutuhan yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di tahun berikutnya.
3. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk pembentukan LSP baru di daerah-daerah.
4. Melakukan penyempurnaan terhadap MoU antara Badan P2SDM dengan Pemerintah Provinsi dalam kerjasama Diklat dan uji kompetensi.
5. Melakukan kerjasama dengan daerah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas asesor.

Dalam pelaksanaannya, faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja penerimaan Tenaga Bakti Rimbawan dan SDM LHK Kompeten adalah sebagai berikut:

1. Tingginya minat para pencari kerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Komunikasi yang harmonis antara Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM dengan calon tenaga Bakti Rimbawan dan calon peserta uji kompetensi.

3. Adanya Kerjasama yang harmonis antara Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM dengan KPH, Bakorluh/Bapeluh, Dinas Kehutanan serta UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Sosialisasi terhadap pelaksanaan penerimaan tenaga Bakti Rimbawan maupun pelaksanaan uji kompetensi SDM LHK.



Gambar 9. Pelaksanaan Uji Kompetensi SDM LHK Tahun 2016

**Output** yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu tersedianya sejumlah 1.224 orang tenaga bakti rimbawan dan SDM LHK kompeten yang mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak. Sedangkan **Outcome** yang diperoleh dari penerimaan Tenaga Bakti Rimbawan dan SDM LHK Kompeten yaitu mendukung percepatan operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan meningkatnya kinerja kelompok tani hutan, KPHP, KPHL dan KPHK dalam menjamin kegiatan kehutanan.

Indikator Kinerja 3 : Jumlah SDM LHK Meningkatkan Kapasitasnya, 4.675 orang.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian LHK. SDM dimaksud adalah yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang handal sehingga mampu menjalankan program-program pembangunan Kementerian LHK. Salah satu wahana paling efektif untuk menghasilkan SDM yang berkualitas tersebut adalah melalui pendidikan dan pelatihan.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM LHK terdiri dari kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM Aparatur KLHK;
2. Pendidikan lanjutan (S2 dan S3)
3. Pengelolaan KHDTK;
4. Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga bakti rimbawan;
5. Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga pendamping KTH; serta
6. Pendidikan menengah kejuruan Kehutanan



Gambar 10. Pelaksanaan Praktek pada Kegiatan Diklat

Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, Badan P2SDM merencanakan peningkatan kapasitas SDM LHK sebanyak 4.675 orang dengan realisasi sebanyak 4.652 orang sehingga capaian indikator kinerjanya sebesar 99,51%. Adapun hasil selengkapnya sebagaimana Tabel 26.

Tabel 26. Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2016

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya	4.675 Orang	4.652 Orang	99,51

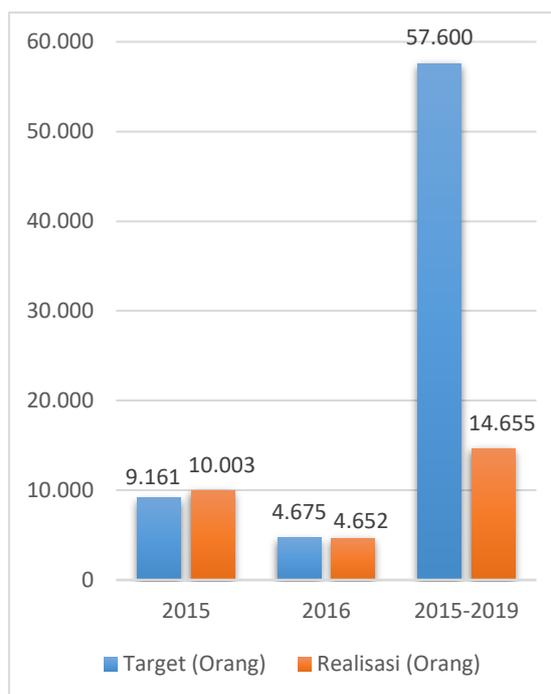
*"Meningkatkan kapasitas SDM yang kompeten dan profesional untuk mendukung pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan"*

Adapun capaian indikator kinerja peningkatan kapasitas SDM LHK per kegiatan sebagaimana Tabel 27.

Tabel 27. Rincian Peningkatan Kapasitas SDM LHK Tahun 2016

No	Output Kegiatan	Target (orang)	Realisasi (orang)	%	Keterangan
1	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur LHK	2.885	2.856	98,99	Diklat pada Pusdiklat 889 orang dan UPT BDLHK 1.967 orang
2	Terwujudnya lulusan pendidikan karyasiswa S2 dan S3 bagi SDM LHK	40	63	150,00	S2 sebanyak 49 orang dan S3 sebanyak 14 orang (Anggaran Kementerian LHK)
3	Meningkatnya kapasitas tenaga bakti rimbawan	600	600	100,00	BDLHK Bogor = 250 BDLHK Pekanbaru = 60 BDLHK P.siantar = 30 BDLHK Samarinda = 80 BDLHK Makassar = 120 BDLHK Kupang = 60
4	Meningkatnya kapasitas tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan	450	420	93,33	BDLHK Kadipaten = 90 BDLHK Pekanbaru = 60 BDLHK P.siantar = 60 BDLHK Samarinda = 60 BDLHK Makassar = 60 BDLHK Kupang = 30 BDLHK Bogor=60
5	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	700	713	101,86	SMKKN Kadipaten = 156 SMKKN Pekanbaru =158 SMKKNMakassar =137 SMKKN Samarinda =144 SMKKN Manokwari =118
Jumlah		4.675	4.652	99,51	

Presentase capaian Indikator Kinerja SDM LHK meningkat kapasitasnya pada Tahun 2016 tidak dapat mencapai 100% atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2015 yang mencapai 109,19%. Penurunan kinerja ini mengakibatkan nilai efektivitas capaian kinerja hanya mencapai 0,91 yang menurut standar pelaksanaan kinerja pada Tahun 2016 belum efektif. Sampai dengan Tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan P2SDM periode Tahun 2015-2019, progres capaian



Gambar 11. Progres Capaian Indikator Kinerja 3 s.d Tahun 2016

indikator kinerja - Jumlah SDM LHK Meningkatkan Kapasitasnya - sebanyak 14.655 orang atau 25,44% dari target Renstra sebanyak 57.600 orang.

Kegiatan penyelenggaraan Diklat pada Tahun 2016 dilaksanakan di Pusat Diklat SDM LHK dan 7 Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan rincian capaian pelaksanaan sebagaimana disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28. Pelaksanaan Diklat pada Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Diklat LHK

No	Satker	Peserta Diklat (Orang)						Jumlah (Orang)
		Aparatur		Bakti Rimbawan		Pendamping KTH		
		T	R	T	R	T	R	
1	Pusdiklat SDM LHK	798	889	-	-	-	-	889
2	BDK Bogor	407	317	250	250	60	60	627
3	BDK Kadipaten	270	270	-	-	90	90	360
4	BDK Pekanbaru	270	270	60	60	60	60	390
5	BDK Pematangsiantar	270	270	30	30	60	60	360
6	BDK Samarinda	270	270	80	80	60	60	410
7	BDK Makassar	330	330	120	120	60	60	510
8	BDK Kupang	270	240	60	60	60	30	330
Jumlah		2.885	2.856	600	600	450	420	3.876

Ket : T = Target; R = Realisasi

Seperti tertuang pada Tabel 28 di atas capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya *self blocking* anggaran sehingga tidak dapat terlaksanakannya beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan, antara lain Diklat Tenaga Pendamping KTH di Balai Diklat LHK Kupang; Diklat Rehabilitasi Kawasan Mangrove, Diklat Manajemen Kebakaran Hutan dan Diklat Pengenalan Jenis Rotan di Balai Diklat LHK Bogor; Diklat Kepemimpinan Tk II, Diklat Calon KKPHK, Diklat Internalisasi Revolusi Mental Bagi Pejabat Eselon III dan IV di Pusat Diklat SDM LHK. Untuk mencapai target tersebut diatas, Badan P2SDM akan lebih mengoptimalkan sumberdaya yang ada termasuk melaksanakan diklat-diklat kerjasama dengan pihak terkait. Nilai efisiensi capaian kinerja berada pada angka 1,03 yang berarti penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja ini termasuk kategori **efisien**.

Faktor yang berpengaruh dalam capaian kinerja pelaksanaan diklat yaitu ketersediaan sarana dan prasarana diklat yang memadai, sumber daya manusia (Widyaiswara dan Pengelola Diklat yang profesional dan kompeten), anggaran yang memadai pada setiap item pengeluaran. Sedangkan faktor yang berpengaruh pada capaian kinerja penyelenggaraan pendidikan kejuruan kehutanan yaitu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, sumber daya manusia (Guru dan Pengelola Pendidikan yang kompeten) dan anggaran yang memadai.



Gambar 12. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Kelas

*"Tersedianya Tenaga Menengah Kejuruan Kehutanan yang profesional mendukung pengelolaan hutan lestari pada tingkat tapak"*



Gambar 13. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan

Permasalahan saat ini dan upaya pemecahan masalah yang perlu menjadi perhatian dalam penanganannya, yaitu :

1. Tidak tercapainya target jumlah IKK untuk lulusan diklat aparatur dengan target 798 orang dan realisasinya 636 orang dikarenakan adanya penghematan anggaran yang berulang-ulang termasuk self-blocking sebesar Rp. 2.578.100.000 setara dengan 6.44%. Strategi yang akan dilakukan Pusat Diklat SDM LHK untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan melalui pengembangan kerjasama dengan lembaga-lembaga diklat pelaksana bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pengembangan kerjasama ini terlaksana diklat sebanyak 253 orang sehingga capaian fisik kinerja Pusat Diklat SDM LHK menjadi sebesar 111.40%.
2. Target IKK RPJMN Pusat Diklat SDM LHK sebanyak 7000 orang, namun demikian karena Kementerian LHK bukan merupakan program prioritas nasional maka Pusat Diklat SDM LHK mendapat alokasi anggaran yang kecil. Untuk mencapai target IKK tersebut Pusat Diklat SDM LHK mengembangkan kegiatan diklat berbasis elektronik. Progres yang dicapai hingga saat ini sudah dikembangkan tiga diklat *blended learning*. Terkait dengan hal itu maka tahun 2017 perlu dilaksanakan :
  - a. Mensosialisasikan dan membudayakan sistem aplikasi *moodle* diklat berbasis elektronik;
  - b. Menyusun SOP diklat *blended learning* (Melalui Perkabadian);
  - c. Memperkuat diklat prajabatan dan diklat PIM III dan IV dengan sistem aplikasi elektronik (sehingga backup dan menambah fasilitas dari Perkalan yang sudah ada) khususnya mengupload semua model dalam bentuk pdf dalam bahasa elektronik, memberikan penugasan agar semua tugas-tugas dimasukan melalui sistem elektronik : coach, penguji dan mentor pengajar diberikan password untuk membuka akses secara elektronik;
  - d. Mendesign diklat full *e-learning* atau seminar/workshop secara elektronik (contoh Diklat ECSCS, Workshop Penguji, Sosialisasi Revolusi Mental);

- e. Perlu penetapan personil IT (*Information Technology*) secara permanen yang meliputi unsur pejabat eselon III, eselon IV, Widyaiswara dan Staf serta di SK-kan secara Khusus;
- f. Perlu memperbaiki jaringan internet yang 50% lagi belum diselesaikan;
- g. Merekrut konsultan untuk membuat rancangan dashboard yang dapat menggabungkan dan menggabungkan LSM dengan aplikasi *moodle* kedalam sistem aplikasi mengikuti training berbasis elektronik;
- h. Membuat *hosting* sendiri, tetap diperbolehkan sebagai *backup domain* di Kementerian LHK.

Mengingat jumlah karyasiswa S2 dan S3 baik dalam negeri dan luar negeri yang melebihi target waktu penyelesaian studi, yaitu 2 tahun untuk S2 dan 4 tahun untuk S3 lebih dari 30%, maka untuk akselerasi penyelesaian studinya dilakukan pembinaan karyasiswa dengan pola *coaching clinic*. Pembinaan tersebut memberikan dampak positif berupa meningkatnya motivasi, penyelesaian studi, terbangunnya sinergi dengan perguruan tinggi, meningkatnya apresiasi dan pembimbingan dari manajemen Perguruan Tinggi yang secara keseluruhan berdampak terhadap cepat terselesaikannya studi karyasiswa-karyasiswa yang bermasalah tersebut. Kedepan perlu dilakukan kombinasi pembinaan dengan sistem *coaching clinic* untuk karyasiswa yang bermasalah dan karyasiswa yang menyelesaikan 1 tahun akan berakhir studi (2 kali setahun), pembinaan reguler untuk karyasiswa yang baru masuk dan karyasiswa tahun kedua dan ketiga.

**Output** dari kegiatan pendidikan dan pelatihan adalah tersedianya sebanyak 4.652 orang SDM LHK yang meningkat kapasitasnya melalui kegiatan Diklat, karya siswa dan pendidikan menengah kejuruan kehutanan. Adapun **outcome** yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya SDM LHK yang kompeten dan profesional untuk mendukung pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

**Indikator Kinerja 4 :** Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya, 3.900 orang, dan 700 unit sekolah/kampus yang berbudaya LH.

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan adalah meningkatkan kompetensi masyarakat dan generasi muda lingkungan hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan melalui penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, Badan P2SDM pada Tahun 2016 merencanakan target kinerja: meningkat kapasitas 3.900 orang generasi lingkungan dan terwujudnya 700 unit sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya LH. Capaian kinerja rata-rata sebesar 91,43 % sebagaimana Tabel 29.



Gambar 14. Pelatihan Perilaku Ramah Lingkungan

Tabel 29. Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2016

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya, dan sekolah/kampus yang berbudaya LH.	3.900 orang	3.198 orang	82,00
		700 unit sekolah/kampus	706 unit sekolah/kampus	100,86
Rata-rata capaian				91,43

Capaian Indikator Kinerja tersebut terdiri dari Meningkatnya Kapasitas Kader LH sebanyak 241 orang, Meningkatnya Kapasitas Generasi Muda LH sebanyak 906 orang, Terwujudnya Sekolah/ Kampus yang Peduli dan Berbudaya

LH sebanyak 706 Sekolah, serta Terbentuknya Anggota Saka Kalpataru Peduli Dan Berbudaya LH sebanyak 2.051 orang sebagaimana disajikan pada Tabel 30 dan secara lebih rinci disajikan pada Lampiran 8 dan 9 .

Tabel 30. Rincian capaian generasi lingkungan meningkat kapasitasnya dan sekolah/kampus berbudaya LH

No	Output Kegiatan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	Meningkatnya Kapasitas Kader Lingkungan Hidup (orang)	400	241	60,25	DAS Brantas 121 orang DAS Barito 120 orang
2	Meningkatnya Kapasitas Generasi Muda Lingkungan Hidup (orang)	1.000	906	90,60	-Pelatihan Perilaku Ramah Lingkungan Bagi Tenaga Pendidik dan Peserta Didik 845 orang -Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan 61 orang
3	Terwujudnya Sekolah/ Kampus yang peduli dan Berbudaya LH (Sekolah)	700	706	100,86	- Adiwiyata Nasional 566 Sekolah - Adiwiyata Mandiri 140 Sekolah
4	Terbentuknya Anggota Saka Kalpataru Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (orang)	2.500	2.051	82,04	Sleman 483 orang Palembang 373 orang Bandar Lampung 468 orang Majalengka 236 orang Makassar 291 orang Kuningan 200 orang

a) Jumlah kader lingkungan yang meningkat kapasitasnya

Yang dimaksud dengan kader LHK adalah seseorang yang memiliki minat dan kesediaan secara sukarela untuk berperan aktif dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dan telah mengikuti pelatihan kader lingkungan hidup dan kehutanan dan/atau telah melakukan gerakan aksi lingkungan hidup dan kehutanan. Kegiatan peningkatan kapasitas kader lingkungan hidup adalah pelatihan bagi calon-calon kader LH dari masyarakat dengan melibatkan Direktorat kemitraan Lingkungan Dirjen PSKL, unit teknis terkait di lingkup kementerian LHK, instansi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) provinsi /kabupaten/kota, Lembaga Swadaya Masyarakat dan komunitas masyarakat.

Pada tahun 2016, pelatihan kader LH dilaksanakan di DAS Brantas bagian tengah tepatnya sidoarjo dan DAS Barito bagian tengah tepatnya di Banjarbaru. Dalam pelaksanaannya, capaian kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait, ketersediaan instruktur dan fasilitator dan kebijakan pelaksanaan pelatihan dalam jumlah besar (masal). Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan sehingga menumbuhkan kesadaran, kepedulian, keinginan untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

b) Jumlah generasi muda lingkungan hidup meningkat kapasitasnya

Generasi lingkungan hidup adalah generasi muda yang memiliki nilai peduli dan berperilaku mencintai lingkungan hidup. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas generasi muda LH bidang lingkungan hidup berupa Pelatihan Perilaku Ramah Lingkungan Bagi Pendidik dan Peserta Didik Tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA atau SMK/MAK yang dilaksanakan di Kota Bandung, Kabupaten Garut, dan Kota Cirebon. Sedangkan pada bidang kehutanan berupa pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bagi masyarakat sekitar hutan dilaksanakan di KotaSingkawang dan Kota Pekanbaru.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik, pendidik dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, lestari dan berkelanjutan.

c) Jumlah Sekolah/Kampus yang peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata)

Pencapaian IKK ini dilakukan melalui kegiatan Adiwiyata. Adiwiyata adalah suatu gerakan pendidikan lingkungan hidup untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Kegiatan adiwiyata meliputi pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan secara

berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Sedangkan jenis penghargaan Adiwiyata meliputi penghargaan Adiwiyata Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri. Kementerian LHK berwenang untuk memberikan penghargaan Adiwiyata Nasional dan Mandiri.

Tahap Penilaian Adiwiyata Mandiri dan Nasional meliputi seleksi administrasi, penilaian dokumen dan verifikasi lapangan. Adapun kriteria penilaian terdiri dari:

- 1) kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan;
  - 2) pelaksanaan kurikulum sekolah berbasis lingkungan;
  - 3) kegiatan lingkungan berbasis partisipatif;
  - dan 4) pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan.
- Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah dan di daerah setempat, misalnya berkurangnya timbulan sampah, berkurangnya CO<sub>2</sub>, penghematan air, listrik dan alat tulis kantor (ATK).

d) Jumlah Anggota Saka Kalpataru peduli dan Berbudaya LH

Yang dimaksud anggota saka kalpataru peduli dan bebudaya lingkungan hidup adalah terbentuknya satuan karya pramuka yang telah dilatih tentang 3 Krida Saka Kalpataru (Krida Pengelolaan Sampah dengan 3R, Krida Perubahan Iklim dan Krida Keanekaragaman hayati). Untuk mewujudkan saka kalpataru yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup tersebut dilakukan melalui pelatihan bagi anggota pramuka Penegak dan Pandega tentang pengenalan krida 3R, krida perubahan iklim dan krida keanekaragaman hayati. Pelaksanaan Pelatihan bekerjasama dengan Direktorat Kemitraan Lingkungan sebagai Ketua PIN Saka Kalpataru, Kwarnas Gerakan Pramuka, Kwarda dan Kwarcab.



Gambar 15. Sekolah penerima penghargaan adiwiyata

*"Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Meningkatkan kompetensi Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan mewujudkan generasi muda yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup"*

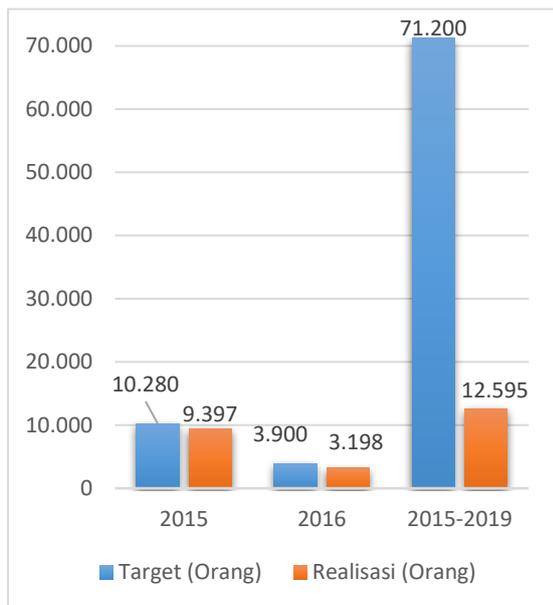
---

Capaian Indikator Kinerja "Jumlah Generasi Lingkungan Meningkatkan Kapasitasnya Dan Sekolah/Kampus peduli dan Berbudaya LH" ini tidak dapat tercapai 100 % sesuai dengan target Perjanjian Kinerja. Hal ini disebabkan karena adanya *self blocking* anggaran. Adapun kegiatan yang tidak dapat terlaksana meliputi:

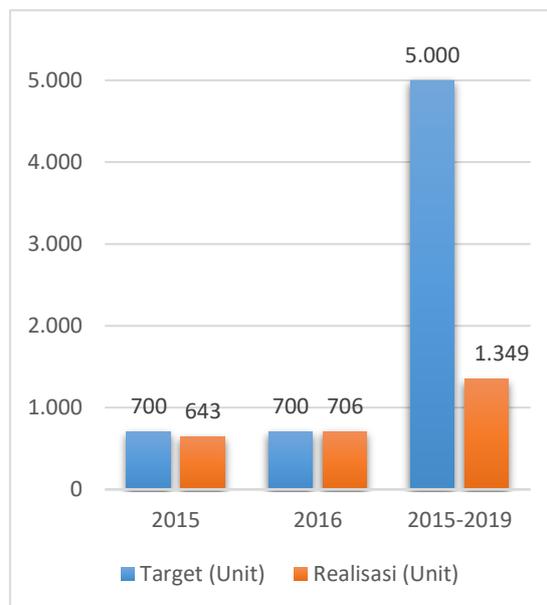
- kegiatan pelatihan kader di Sumatera Selatan sebanyak 150 orang,
- pelatihan perilaku ramah lingkungan bagi siswa SMA/Sederajat di Indramayu sebanyak 100 orang, dan
- Pelatihan pengenalan Saka Kalpataru di Jawa Timur sebanyak 450 orang.

Dibandingkan persentase capaian kinerja tahun 2015, maka capaian kinerja pada Tahun 2016 mengalami penurunan yaitu dari 91,64 % menjadi 91,43%. Hal ini mengakibatkan nilai efektivitas dari kegiatan ini menurun sebesar 0,99. Sedangkan untuk mencapai kinerja sebesar 91,43% didukung dengan penggunaan anggaran sebesar 85,82 % dari pagu anggaran APBN-P, sehingga efisiensi dari kegiatan sebesar 1,07 atau kegiatan tersebut berjalan secara efisien.

Sampai dengan Tahun 2016, capaian kinerja jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya dan sekolah/kampus peduli dan berbudaya LH yaitu sebanyak 12.595 orang dan 1.349 sekolah/kampus dari target 71.200 orang dan 5.000 sekolah/kampus pada Rencana Strategis (Renstra) Badan P2SDM Tahun 2015-2019 atau sebesar 17,69% dan 26,98% dengan rata-rata 22,33% sebagaimana disajikan pada Gambar 16 dan 17.



Gambar 17. Progres Capaian Indikator Kinerja generasi lingkungan meningkat kapasitasnya s.d Tahun 2016



Gambar 16. Progres Capaian Indikator Kinerja sekolah/kampus yang berbudaya LH s.d Tahun 2016

**Output** dari kegiatan ini yaitu terlatihnya 3.198 orang generasi lingkungan dan 706 sekolah/kampus yang berbudaya lingkungan hidup. Sedangkan **outcome** yang dihasilkan dari output tersebut yaitu meningkatnya peran aktif masyarakat khususnya generasi muda lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di komunitasnya.

Selain keempat Indikator Kinerja Program tersebut di atas, terdapat kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Satker Sekretariat Badan P2SDM.

**Indikator Kinerja Pendukung :** Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 81,00 (A) di Tahun 2016.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian

outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, kegiatan ini didukung 4 elemen kegiatan yaitu 1) Tata Kelola di Bagian Program dan Kerjasama; 2) Tata Kelola di Bagian Keuangan dan Umum; 3) Tata Kelola di Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi; 4) Tata Kelola di Bagian kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana.

Capaian Kinerja kegiatan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 81,00 (A) di Tahun 2016 yaitu 90,60 poin atau sebesar 111,85% sebagaimana Tabel 31.

**Tabel 31. Hasil Pengukuran Capaian Kerja Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan P2SDM**

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 81,00 (A) di Tahun 2016.	81,00 Poin	90,60 Poin	111,85

Pengukuran kinerja atas indikator ini didasarkan pada hasil penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian LHK atas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan P2SDM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komponen penilaian mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Secara rinci penilaian pada masing-masing komponen disajikan pada Tabel 32.

Tabel 32. Komponen Penilaian SAKIP Badan P2SDM

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,72
2.	Pengukuran Kinerja	25	24,25
3.	Pelaporan Kinerja	15	15,00
4.	Evaluasi Kinerja	10	10,00
5.	Capaian Kinerja	20	15,63
Total		100	<b>90,60</b>
Kategori SAKIP		AA	Sangat Memuaskan

Output dari kegiatan ini yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai 90,60 (AA) di Tahun 2016. Outcome yang dihasilkan yaitu Badan P2SDM dapat mempertanggungjawabkan dan menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ke arah tata kelola pemerintahan yang baik.

## B. Capaian Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Badan P2SDM Tahun 2016 sebesar Rp. 348.061.545.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 332.037.996.961,- atau sebesar 95,40%. Adapun rincian capaian kinerja anggaran pada setiap Kegiatan disajikan pada Tabel 33 dan realisasi per Satker disajikan pada Tabel 33.

Tabel 33. Realisasi Anggaran Per Kegiatan lingkup Badan P2SDM Tahun 2016

*Dalam ribuan rupiah*

No	Kode	Nama Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)		Realisasi		
			APBN-P	Tanpa Self Blocking (SB)	Rp.	%	% tanpa SB
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	348.061.545	334.437.515	332.037.996	95,40	99,28
1	5444	Peningkatan Penyuluhan	18.247.053	16.747.053	16.717.165	91,62	99,82
2	5440	Perencanaan dan Pengembangan SDM	65.529.772	64.182.002	64.177.526	97,94	99,99
3	5441	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	143.177.100	137.368.460	136.457.192	95,31	99,34

No	Kode	Nama Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)		Realisasi		
			APBN-P	Tanpa <i>Self Blocking</i> (SB)	Rp.	%	% tanpa SB
4	5442	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	72.278.547	72.278.547	71.019.805	98,26	98,26
5	5443	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	16.341.076	14.082.756	14.024.395	85,82	99,59
6	5439	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	32.487.997	29.778.697	29.641.913	91,24	99,54

Tabel 34. Realisasi Anggaran Per Satker lingkup Badan P2SDM Tahun 2016

*Dalam ribuan rupiah*

No	Satker	Pagu		Realisasi		
		APBN-P	Tanpa <i>Self Blocking</i>	Realisasi	%	% tanpa SB
	Badan P2SDM	348.061.545	334.437.515	332.037.996	95,40	99,28
1	Sekretariat Badan	32.487.997	29.778.697	29.641.913	91,24	99,54
2	Pusat Penyuluhan	18.247.053	16.747.053	16.717.165	91,62	99,82
3	Pusrenbang SDM	65.529.772	64.182.002	64.177.526	97,94	99,99
4	Pusdiklat SDM LHK	42.806.458	40.048.358	39.754.975	92,87	99,27
5	Puslatmas dan PGL	16.341.076	14.082.756	14.024.395	85,82	99,59
6	Balai Diklat LHK Bogor	16.458.723	15.943.093	15.896.379	96,58	99,71
7	Balai Diklat LHK P.Siantar	12.631.574	12.326.674	12.298.740	97,37	99,77
8	Balai Diklat LHK Samarinda	13.083.592	12.760.212	12.694.316	97,02	99,48
9	Balai Diklat LHK Makassar	16.503.594	15.575.204	15.405.010	93,34	98,91
10	Balai Diklat LHK Pekanbaru	13.718.584	13.506.454	13.465.544	98,16	99,70
11	Balai Diklat LHK Kadipaten	14.129.686	13.714.776	13.662.509	96,69	99,62
12	Balai Diklat LHK Kupang	15.077.021	14.725.821	14.510.929	96,25	98,54
13	SMKK N Manokwari	15.388.259	15.388.259	14.761.666	95,93	95,93
14	SMKK N Kadipaten	13.395.625	13.395.625	13.082.866	97,67	97,67
15	SMKK N Makassar	13.193.625	13.193.625	13.081.315	99,15	99,15
16	SMKK N Samarinda	15.634.281	15.634.281	15.533.147	99,35	99,35
17	SMKK N Pekanbaru	13.434.625	13.434.625	13.329.602	99,22	99,22

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penyerapan Badan P2SDM terhadap pagu APBN-P yaitu sebesar 95,40% atau setara dengan 99,28% (jika menggunakan pagu anggaran setelah dikurangi *self blocking*). Penyerapan anggaran Badan P2SDM Tahun 2016 tidak dapat terealisasi 100% disebabkan oleh:

1. Adanya anggaran *self blocking* yang tidak dapat dicairkan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 sehingga adanya anggaran yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp. 13.624.030.000,- atau sebesar 3,91% dari pagu anggaran.
2. Terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat berjalan sesuai jadwal karena adanya kebijakan dari Kementerian Keuangan mengenai pencairan anggaran yang tidak dapat menggunakan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Badan P2SDM, agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang di Tahun 2017, antara lain yaitu:

1. Lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan berbasis kerjasama sehingga indikator kinerja tetap tercapai.
2. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan, Satker lingkup Badan P2SDM agar lebih mengutamakan penarikan anggaran dengan mekanisme LS dan UP sehingga tidak harus menunggu TUP.

## BAB IV. PENUTUP

---

Pengukuran capaian kinerja Badan P2SDM Tahun 2016 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 100,66%. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, kinerja Badan P2SDM sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan terdapat peningkatan capaian kinerja dari Tahun 2015 yaitu sebesar 92,97% menjadi 100,66% atau nilai rasio efektivitas sebesar 1,08. Hal yang sama juga tercermin pada efisiensi penggunaan anggaran Badan P2SDM yang menunjukkan hasil sebesar 1,06.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Badan P2SDM sebagai salah satu Eselon I pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyelenggarakan program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Laporan Kinerja Badan P2SDM ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan P2SDM kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan P2SDM, yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja kedepan.



# LAMPIRAN





## Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Badan P2SDM dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, MM

Jabatan : KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2015

Pihak Kedua,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,

Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, MM  
NIP. 19561215 198203 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
a.	Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>472 Unit KTH (Meningkatnya kelas KTH sebanyak 450 unit dan terbentuknya koperasi KTH sebanyak 22 unit)</li> </ul>
b.	Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.277 orang (Jumlah tenaga bakti rimbawan sebanyak 1.777 orang dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK kompeten sebanyak 500 orang)</li> <li>4.699 orang (Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya sebanyak 3.940 orang, lulusan karyasiswa S2/S3 sebanyak 40 orang, tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak 719 orang)</li> <li>4.500 orang dan 700 unit (Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya sebanyak 4500 orang dan 700 unit sekolah/kampus yang berbudaya LH)</li> </ul>

**No.**

**Program/Kegiatan**  
**Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**

1. Perencanaan dan Pengembangan SDM.
2. Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK.
3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan.
4. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup.
5. Peningkatan Penyuluhan.
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

**Anggaran (x Rp.1.000,-)**  
**360.838.691**

Jakarta, Desember 2015

MENTERI

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPALA BADAN

PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, MM  
NIP. 19561215 198203 1 002

## Lampiran 2. Nota Dinas dan Pernyataan Revisi Perjanjian Kinerja Badan P2SDM



### KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 14 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270  
Email : bp2sdmk@dephut.go.id Telp. : (021) 5731815 Fax. : (021) 5731815

#### NOTA DINAS

Nomor : *ND.169/P2SDM/DEK/PEN.3/12/2016*

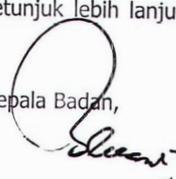
Yth. : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Dari : Kepala Badan P2SDM  
Hal : Persetujuan Revisi Perjanjian Kinerja Badan P2SDM tahun 2016  
Lampiran : 1 Eksemplar  
Tanggal : *98* Desember 2016

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui mekanisme penghematan anggaran (APBN-P) pada Satker Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan dari Rp. 18.428.000.000 menjadi Rp. 16.341.076.000 yang mengakibatkan pengurangan target volume kegiatan yaitu jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya dari 4.500 orang menjadi 3.900 orang.
2. Selain hal tersebut di atas terdapat beberapa perubahan target volume keluaran kegiatan disebabkan oleh kesalahan administrasi, yaitu:
  - a. Jumlah SDM LHK yang meningkat kapasitasnya dari 4.699 orang menjadi 4.675 orang.
  - b. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Tingkat Tapak dan SDM LHK Kompeten dari 2.277 orang menjadi 1.100 orang, dengan penjelasan sebagai berikut:
    - Jumlah 1.100 orang terdiri dari 600 orang rekrutmen Tenaga Bakti Rimbawan Tahun 2016 dan 500 orang SDM LHK kompeten.
    - Jumlah 1.177 orang merupakan Tenaga Magang Tahun 2016 sebanyak 118 orang, dan penerimaan Tenaga Bakti Rimbawan Tahun 2015 sebanyak 1.059 orang yang honorinya dibayarkan selama 2 tahun sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MenLHK-Setjen/2015 pasal 26 ayat (1) Tentang Jangka Waktu dan Penilaian Kinerja Bakti Rimbawan.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62/PMK.02/2016, dalam hal volume keluaran (output) yang berkurang selain volume keluaran (output) dari kegiatan Prioritas Nasional, Usul pengurangan volume Keluaran (Output) disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran untuk mendapat persetujuan.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak ada arahan lain dari Ibu, kami mohon persetujuan revisi Perjanjian Kinerja Badan P2SDM Tahun 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan petunjuk lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Kepala Badan,

  
Dr. Ir. Bambang Soepijanto, MM  
NIP. 19561215 198203 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian LHK
2. Inspektur Jenderal Kementerian LHK

**Pernyataan Revisi Perjanjian Kinerja  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2016**

Berdasarkan persetujuan Revisi Perjanjian Kinerja (PK) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas Nota Dinas Nomor ND.167/P2SDM/SET/REN.3/12/2016 tanggal 28 Desember 2016, dengan ini saya membuat pernyataan Revisi Perjanjian Kinerja Badan P2SDM Tahun 2016 sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara	Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara	472 Unit KTH (meningkatnya kelas KTH sebanyak 450 unit dan terbentuknya koperasi KTH sebanyak 22 unit)
2	Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem	Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Kesimbangan Ekosistem	1.100 orang (Jumlah tenaga bakti rimbawan sebanyak 600 orang dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK kompeten sebanyak 500 orang) 4.675 Orang (Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya sebanyak 3.935 orang, lulusan karyasiswa S2/S3 sebanyak 40 orang, tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak 700 orang) 3.900 orang dan 700 unit (Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya sebanyak 3.900 orang dan 700 unit sekolah/kampus yang berbudaya LH)

Anggaran Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Rp. 348.061.545.000

**Kegiatan**

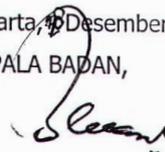
**Anggaran**

1. Perencanaan dan Pengembangan SDM	Rp. 65.529.772.000
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK	Rp. 143.177.100.000
3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Rp. 72.278.547.000
4. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Rp. 16.341.076.000
5. Peningkatan Penyuluhan	Rp. 18.247.053.000
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM	Rp. 32.487.997.000

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Desember 2016

KEPALA BADAN,



Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, MM  
NIP. 19561215 198203 1 002

Lampiran 3. Rincian Capaian Peningkatan Kelas KTH melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Kehutanan

NO.	Nama KTH	ALAMAT KTH			Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH	JML KTH
		DESA/KEL.	KECAMATAN	KABUPATEN			
1	<b>JAWA BARAT</b>						10
1	Jaya Kinanti	Ds. Ciakar	Kec. Cijulang	Kab. Pangandaran	Hutan Rakyat,lebah madu	Irfan Afandi, S.Hut	
2	Hegarsari	Ds. Karang Sari	Kec. Padaherang	Kab. Pangandaran	Hutan Rakyat,lebah madu	Toni Afandi, S.Hut	
3	Mutiara Bukit	Ds. Mekaraksana	Kec. Cikancung	Kab. Bandung	HR, Jamur kayu,ternak	Ling Ibrahim, SP	
4	Pasjirak	Ds. Cipreat	Kec. Cilengkrang	Kab. Bandung	Persemaian,Jamur kayu	M. Yusuf, SP	
5	Uندن I	Ds. Sukakarta	Kec. Jatiwaras	Kab. Tasikmalaya	Hutan Rakyat,lebah madu	Taufik Hidayat	
6	Mekarsari V	Ds. Kubang Sari	Kec. Cikalong	Kab. Tasikmalaya	HR, Persemaian,lebah madu	Usup, SP	
7	Kadali Kencana	Ds. Hujungtiwu	Kec. Panjalu	Kab. Ciamis	Hutan Rakyat,lebah madu	Nandi Kuswandi	
8	Wahana Mukti Jagabaya	Ds. Jabaya	Kec. Panawangan	Kab. Ciamis	Hutan rakyat	Rusdianan, SP	
9	Wana Lestari	Ds. Sadeng	Kec. Leuwisadeng	Kab. Bogor	Agroforestry	Sarah Wididyatami, S.Hut, MM	
10	Pabangbon	Ds. Gununggeulis	Kec. Sukaraja	Kab. Bogor	Hutan rakyat	Mugia	
2	<b>BANTEN</b>						16
1	Sinar Lestari	Ds. Cibaliung	Kec. Cibaliung	Kab. Pandeglang	HR, agroforestry		
2	Mekarsari	Ds. Cibitung	Kec. Munjul	Kab. Pandeglang	HR, agroforestry	Jumhana Kosasih, SP	
3	Neglasari	Ds. Telaga Sari	Kec. Saketi	Kab. Pandeglang	HR, agroforestry	Riksan Rustiawan, S.Hut	
4	Cikahuripan	Ds. Mandalasari	Kec. Kadhrjo	Kab. Pandeglang	HR, agroforestry	RAR Cepy, STP	
5	Nagara	Ds. Tapos	Kec. Cadasari	Kab. Pandeglang	HR, agroforestry	Eem Emaliah, S.Hut	
6	Tunas jaya	Ds. Cihayang	Kec. Picung	Kab. Pandeglang	HR, agroforestry	Ilham Malik, S.Hut	
7	Karya Tani	Ds. Cimanis	Kec. Sobang	Kab. Pandeglang	HR, agroforestry	Agus Hidayat	
8	Kadu Bandung	Ds. Badur	Kec. Cirinten	Kab. Lebak	HR, agroforestry	Untung Timur	
9	Beranda Buit	Ds. Pamubulan	Kec. Bayah	Kab. Lebak	HR, agroforestry		
10	Sri Mukti	Ds. Bejod	Kec. Wanasalam	Kab. Lebak	HR, agroforestry		
11	Teguh Santosa	Ds. Kalanganyar	Kec. Kalanganyar	Kab. Lebak	HR, agroforestry	Dudi Permadi	
12	Hutan Mulya	Ds. Mekarmanik	Kec. Bojong Manik	Kab. Lebak	HR, agroforestry		
13	Gekombang Bukit	Ds. Cibarengkok	Kec. Pangarangan	Kab. Lebak	HR, agroforestry, lebah madu	Oma Sukarma	
14	Karya Mulya	Ds.Kapunduhan	Kec. Cijaku	Kab. Lebak	HR, agroforestry		
15	Mustiakan Tani	Ds. Pancanegara	Kec. Pabuaran	Kab. Serang	HR, agroforestry	Sanwani	
16	Karang Mas	Ds. Cisit	Kec. Ciomas	Kab. Serang	HR, agroforestry		
3	<b>JATENG</b>						30
1	Guyup Rukun	Ds. Rakitan	Kec. Madukara	Kab.Banjarnegara	sengon, agroforestry	Wahyu Dwi Maryati, SP	
2	Pergunung	Ds. Melung	Kec. Madukara	Kab. Banyumas	Sengon, agroforestry,ternak	Setyo Jumanto, SP	
3	Banjarsari	Ds. Semampir	Kec. Madukara	Kab. Batang	sengon,mahoni,kayu2n	Anjar Siswoyo,S.Hut	
4	Bhakti Makmur	Ds. Wonomerto	Kec. Bandar	Kab. Batang	sengon,mahoni, kayu2n	Asikin, SP	
5	Taru Kismo	Ds. Kaligentong	Kec. Ampel	Kab. Boyolali	Agroforestry, sengon,	Turut, S.TP	
6	Wono Lestari	Ds. Pentur	Kec. Simo	Kab. Boyolali	sengon,mahoni,agroforestry	Margono, STP	
7	Margo Luhur	Ds. Crewek	Kec. Kradenan	Kab. Grobogan	sengon,pembibitan kayu2an	Supaya, STP	
8	Ngudi Rahayu II	Ds. Mojorebo	Kec. Wonosari	Kab. Grobogan	sengon,pembibitan kayu2an	Haris Endang, S, STP	
9	Ngudi Sampurno III	Ds. Jugo	Kec. Donorejo	Kab. Jepara	Agroforestry, sengon	Tri AndikSetyawan, S.Hut	
10	Rimba Jati Lestari	Ds. Kebak	Kec. Jumantono	Kab. Karanganyar	sengon,mahoni,	Joko Pramono, SP	

NO.	Nama KTH	ALAMAT KTH			Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH	JML KTH
		DESA/KEL.	KECAMATAN	KABUPATEN			
11	Subur	Ds. Plumbon	Kec. Karang Sambung	Kab. Kebumen	sengon,mahoni, kayu2n	Muryani	
12	Tlogo Mulyo	Ds. Tlogosari	Kec. Ayah	Kab. Kebumen	sengon,mahoni,kayu2n	Loso Riyanto	
13	Sidodadi	Ds. Sedayu	Kec. Tulung	Kab. Klaten	sengon,mahoni,gaharu	Amir, SP	
14	Sari Rejo	Ds. Rahtawu	Kec. Gebog	Kab. Kudus	sengon,mahoni,agroforestry	Ahmad Hidayatullah Biri, SP	
15	Margo Makmur	Ds. Ngrancah	Kec. Grabag	Kab. Magelang	sengon,mahoni,kayu2n	Rima Nur Hikmah, A.Md	
16	Wana Lestari Jonggol	Ds. Siti Luhur	Ds. Gembong	Kab. Pati	sengon,mahoni,agroforestry	Mustamir, SP	
17	Wana Lestari Putra	Ds. Sidomulyo	Kec. Gunungwungkal	Kab. Pati	lebah madu,sengon,HR	Anik Sri Kismiyati, SP	
18	Krido Mulyo	Ds. Karangasem	Kec. Talun	Kab. Pekalongan	HR, sengon	Suprpto, S.Hut	
19	Tani Makmur	Ds. Nyalembeng	Kec. Pulosari	Kab. Pemalang	sengon,mahoni,kayu2n	Budiyanto, SP	
20	Cipta Utama	Ds. Cendana	Kec. Kutasari	Kab. Purbalingga	HR, sengon,mahoni,Madu	Dwi Sulistiyono, S.Hut	
21	Mekar Manunggal	Ds. Sidareja	Kec. Kaligondang	Kab. Purbalingga	sengon,HR,mahoni	Kumala Dewi, S.Hut	
22	Wanjaya	Ds. Hargorojo	Kec. Bagelen	Kab. Purworejo	Salak,sengon,jati	NC. Teguh Santoso, S.hut	
23	Sumber Makmur	Ds. Ngargosari	Kec. Loano	Kab. Purworejo	Madu,sengon,	Parwanta, STP	
24	Makmur	Ds. Pasucen	Kec. Gunem	Kab. Rembang	sengon,mahoni,HR	Slamet, SP	
25	Rakuti	Ds. Sudo	Kec. Sulang	Kab. Rembang	sengon,HR,pembibitan	Roni Sri Asih, SP	
26	Sido Hasil II	Ds. Bantal	Kec. Bancak	Kab. Semarang	sengon,mahoni,HHBK	Abubakar, STP	
27	Mulya Tani	Ds. Karang Mulya	Kec. Bojong	Kab. Tegal	sengon,mahoni,lebah madu	Yunida Wahyu D, SP	
28	Ayo Makaryo	Ds. Tegalrejo	Kec. Bulu	Kab. Temanggung	sengon,tembako, kayu2n	Tuhu Suprpti, A.Md	
29	Wono Mulyo	Ds. Kenteng	Kec. Purwantoro	Kab. Wonogiri	HKM,sengon,agroforestry	Endah Susilowati, SST	
30	Tegal Arum	Ds. Tlogojati	Kec. Wonosobo	Kab. Wonosobo	sengon,mahoni, HHBK	Rohmadi, SP	
4	<b>DIY</b>						20
1	Madusari	Payuyon Ds. Pacrejo	Kec. Semanu	Kab. Gunung Kidul	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Sri Budi Setyowati	
2	Tani Mandiri	Ds. Nglipar	Kec. Nglipar	Kab. Gunung Kidul	Sengon, HR,agroforestry	Hartadi, S.TP	
3	Bakti Wana XIII	Ds.Giriharjo	Kec. Panggang	Kab. Gunung Kidul	HR, Madu, HR,agroforestry	Santoso, S.TP	
4	Sidomulyo	Ds. Karang Sari	Kec. Semin	Kab. Gunung Kidul	Agroforestry, HR	YB. Endratno	
5	Ngudi Makmur	Ds. Gedangerjo	Kec. Karangmojo	Kab. Gunung Kidul	Agroforestry, HR, madu	Sutaryono, S.TP	
6	Karya Mukti	Ds. Bohol	Kec. Rongkop	Kab. Gunung Kidul	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Bambang Suntarno	
7	Karya Makmur	Ds. Hargosari	Kec. Tanjungsri	Kab. Gunung Kidul	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Sutarmi	
8	Kentingan	Ds. Sindumartani	Kec. Ngemplak	Kab. Sleman	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Sumini, SP	
9	Harapan	Ds. Sumber Rahayu	Kec. Mayudan	Kab. Sleman	Tan.Kayu2an, agroforestry	Dwi Sulistiyowati, SP	
10	Lestari Maju	Ds. Jogotirto	Kec. Berbah	Kab. Sleman	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Susilo DwiHartanto, A.Md	
11	Ngudi Lestari	Ds. Wukirsari	Kec. Cangkringan	Kab. Sleman	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Dwiantara, S.ST	
12	Ngudi Makmur	Ds. Hargowilis	Kec. Kokap	Kab. Kulon Progo	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Suroso, SP	
13	Ngudi Rejeki	Ds. Banjarharjo	Kec. Kalibawang	Kab. Kulon Progo	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Supriyanto	
14	Ngudi Raharjo	Ds. Sidorejo	Kec. Lendah	Kab. Kulon Progo	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Wahyu Navitri H,S.Hut	
15	Wono Segoro	Ds. Garongan	Kec. Panjatan	Kab. Kulon Progo	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Sukarjan, S.Hut	
16	Wanasri Bogo	Ds. Kaliagung	Kec. Sentolo	Kab. Kulon Progo	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	M. Alex Zubaedi, S.Hut,MIL	
17	Amrih Widodo	Ds. Temuwuh	Kec. Dlingu	Kab. Bantul	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Edy Priyatno, S.TP	
18	Ngudi Makmur	Ds. Bawuran	Kec. Pleret	Kab. Bantul	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	SW Purnomo, S.Hut,MT	
19	Ngudi Lestari	Ds. Sendangsari	Kec. Pajangan	Kab. Bantul	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	M. Aris K, S.Hut, MP	
20	Alhidayah	Ds. Selopamiro	Kec. Imogiri	Kab. Bantul	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Mawardi, S.TP, MM	
5	<b>NAD</b>						9

NO.	Nama KTH	ALAMAT KTH			Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH	JML KTH
		DESA/KEL.	KECAMATAN	KABUPATEN			
1	Simahate	Kp. Dama Mulyo	Kec. Atu Lintang	Kab. Aceh Tengah	Hkm, HR	Kana Emnurlis	
2	Rimbun	Ds. Gung Singit	Kec. Silih Nara	Kab. Aceh Tengah	Hkm, HR	RizaIlhamzah	
3	Bina Usaha	Ds. Reronga	Kec. Gajah Putih	Kab. Bener Meriah	Hkm, HR	Idris, SP	
4	Damai Karya	Ds. Biang Minyak	Kec. Sawang	Kab. Aceh Utara	Hkm, HR	Wardiah , SP	
5	PentoSigedoeck	Ds. Gampong Seuum	Kec. Mesjid Raya	Kab. Aceh Besar	Hkm, HR	Hirwansyah, S.Hut	
6	Gunong Ijo	Ds. Blang Samagadeng	Kec. Pandrah	Kab. Bireun	Hkm, HR	Ftiradi, S.hut	
7	Yakin Sabe	Ds. Krueng Meusegub	Kec. Simpang Mamplam	Kab. Bireun	Hkm, HR	Elfia, S.Hut	
8	Ujung Tamiang	Ds. Kuruk III	Kec. Seruway	Kab. Aceh Tamiang	Hkm, HR	Rijanalpa	
9	Tani Makmur	Ds. Gampang Blang Mane	Kec. Peusangan Selatan	Kab. Bireun	Hkm, HR	Zainuddin, S.Hut	
6	<b>SUMATERA BARAT</b>						11
1	Agrovorestry Sawah Liek	Ds. Kampung Manggis	Kec. Padang panjang Barat	Kab. Padang Panjang	Hutan rakyat, Kopi, Jahe	Mada Rusli	
2	Kelta Sako Mandiri	Ds. Sitiung	Kec. Sitiung	Kab. Dhamasraya	Hutan rakyat, Kopi, Jabon	Zulbaini	
3	Sukamenang Aia Kacang	Ds. Sinuruik	Kec. Talamau	Kab. Pasaman Barat	Kayumanis, Aren, Kapulaga		
4	Subur Jaya	Ds. Suliki	Kec. Suliki	Kab. 50 Kota	Hutan rakyat, Karet, Durian dll	Monalisa	
5	Bukik Godang	Ds. Sarilamak	Kec. Harau	Kab. Agam	Hutan rakyat, pembibitan	Mimitra	
6	Amanah	Ds. Salimpariak	Kec. Banuhampu	Kab. Agam	Konservasi, Agroforestry	Elniferi	
7	Cangkang	Ds. Sianok Anam Suku	Kec. IV Koto	Kab. Agam	Agroforestry, , Mahoni, Sirian	Uri Samsuri	
8	Hutan Rimbo Wisata	Ds. Koto Tengah	Kec. Tilatang kamang	Kab. Agam	Jasling, Durian, Manggis	Elimarni	
9	LPHN Lubuk Alung	Lubuk Alung	Kec. Lubuk Alung	Kab. Padang Pariaman	Budi daya Gaharu	Joni Hendra	
10	Usaha Mandiri	Sikucur	Kec. Koto Kampuang Dlm	Kab. Padang Pariaman	Budidaya Gaharu	Arfan	
11	LPHN Bukik Panjang	Alam Pauh Duo	Kec. Pauh Duo	Kab. Solok Selatan	HHBK Jasa Lingkungan	Joni Putra	
7	<b>RIAU</b>						4
1	Sumber Rezeki	Ds. Bantan Tengah	Kec. Bantan	Kab. Bengkalis	Lebah Madu	Natalia	
2	Mandiri Gunung Jati	Ds. Koto Baru	Kec. Tapung	Kab. Kampar	Karet, Merica, Madu	Junaedi	
3	Rimbo Kali Munjang	Ds. Perhentian Luas	Kec. Tanah Darat	Kab. Kuantan Senggigi	Karet	Rohani Murti	
4	Master Jaya	Ds. Pasir Jaya	Kec. Rambah Hilir	Kab. Rokan Hulu			
8	<b>JAMBI</b>						4
1	Sungai Lamin	Ds. Senamat	Kec. Bathin III Ulu	Kab. Bungo	Hutan Desa		
2	Sabar Usaha	Ds. Catur Usaha	Kec. Dendang	Kab. Tanjab Timur	HR, Tanaman Jelutung		
3	Jeruang Jaya	Ds. Sungai Jernih	Kec. Pondok Tinggi	Kota Sungai Penuh	Agroforestry		
4	Mitra Usaha	Ds. Sungai Betung Hilir	Kec. GunungKerinci	Kab. Kerinci	HR, Nilam,Agroforestry		
9	<b>BABEL</b>						8
1	Aik Ruak I	Ds. Simpang Tiga	Kec. Simpang Renggiang	Kab. Beltung Timur	Agroforestry	Ria Mariana, A.Md	
2	Wanita Tani	Ds. Jangkang	Kec. Dendang	Kab. Belitung Timur	Pembb.tan.hutan, Anyaman,Sirup	Binsar Daulay, S.Hut	
3	Tebat Tetebu	Ds. Air Seruk	Kec. Siju	Kab. Belitung	Agroforestry, lebah madu, rotan	Anak Agung BD, S.Hut	
4	Gaharu Harapan I	Ds. Lubuk Pabrik	Kec. Lubuk Besar	Kab. Bangka Tengah	HHBK	Mirwanto, A.Md	
5	Gaharu Harapan II	Ds. Lubuk Pabrik	Kec. Lubuk Besar	Kab. Bangka Tengah	HHBK	Erfansyah, SP	
6	Gaharu Harapan III	Ds. Lubuk Pabrik	Kec. Lubuk Besar	Kab. Bangka Tengah	HHBK, teh, daun gaharu	Erfansyah, SP	
7	Nadi Lestari	Ds. Periang	Kec. Lubuk Besar	Kab. Bangka Tengah	HHBK,penyulng m.kayuputih	Mirwanto, A.Md	

NO.	Nama KTH	ALAMAT KTH			Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH	JML KTH
		DESA/KEL.	KECAMATAN	KABUPATEN			
8	Air Pasir Maju	Ds. Lampung	Kec. Sungai Selan	Kab. Bangka Tengah	HHBK, madu, jamur, rotan, resam	Herowansa EdiAtmaja, SP	
<b>10</b>	<b>SUMSEL</b>						<b>2</b>
1	KTH Sinar Tani I	Ds. Trijaya	Kec. BTS Ulu	Kab. Musirawas	Agroforestry, Gaharu	Bambang Pratisto, SP	
2	KTH Peduli Sampah	Ds. Abang Jaya	Kec. Tanah Abang	Kab. Pali	HR, Pembuatan Pupuk	Isman Prabujaya	
<b>11</b>	<b>LAMPUNG</b>						<b>14</b>
1	Cadasari	Ds. Banut Seberang	Kec. Way Ratai	Kab. Pesawaran	Pembibitan Damar, Mata kucing		
2	Harum Damai	Ds. Kota Jawa	Kec. Way Khilau	Kab. Pesawaran	Pembibitan Damar, Mata kucing		
3	Randu Alas	Ds. Waringin Sari	Kec. Adiluwih	Kab. Tanggamus 3 KTH	Bibit, Pernakan, sengon, aren		
4	Bakti Makmur X	Ds. Teratas	Kec. Kota Agung	Kab. Tanggamus	Kakao, Durian, Gula aren		
5	Lestari Jaya 2	Ds. Sumber Rejo	Kec. Sumber Rejo	Kab. Tanggamus	Gula aren, kopi, pisang, cabe		
6	Sido Lestari	Ds. Gisting Permai	Kec. Gisting	Kab. Tanggamus	HR, Kayu2an, anggrek, pakis		
7	Betung Jaya	Ds. Karang Jaya	Kec. Merbau Mataram	Kab. Lampung Selatan	Lebah Madu, gula aren, kayu2an		
8	Wana Harapan Baru	Ds. Sido Luhur	Kec. Bangun Rejo	Kab. Lampung Tengah	Bibit Kayu2an, T. kambing,		
9	Tunas Muda II	Ds. Sido Luhur	Kec. Bangun Rejo	Kab. Lampung Tengah	HR, Kayu2an, Empon2, Jamur		
10	Wana Lestari	Ds. Gedung Surian	Kec. Gedung Surian	Kab. Lampung Barat	Kopi, Pisang, Lebah Madu		
11	Bina Wana	Ds. Tribudisyukur	Kec. Kebun Tebu	Kab. Pesisir Barat	Pemb. Tanaman Endemik		
12	Karya Mekar	Ds. Rajabasa	Kec. Bengkuntan	Kab. Pesisir Barat	Damar makucing, Sengon, Aren		
13	Pandawa Lestari	Ds. Pakunegara	Kec. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Damar makucing, Sengon, Aren		
14	Marga Mukti	Ds. Margajasa		Lampung Selatan	Pengayaan Tanaman	Samsudin	
<b>12</b>	<b>KALBAR</b>						<b>2</b>
1	Batu Sira	Ds. Nawa Serangai	Kec. Serawai	Kab. Sintang	Penanaman Mahoni	Restituta Harpina, S.Hut	
2	Bukit Liang	Ds. Pelimping	Kec. Kelam Permai	Kab. Sintang	HKM, Hutan Rakyat	Indra Kurniati, S.Hut	
<b>13</b>	<b>KALSEL</b>						<b>7</b>
1	Karya Bersama	Ds. Bulayak	Kec. Hantakan	Kab. Hulu Sungai Tengah	KBR, HR		
2	Rimba Asri	Ds. Landasan Ulin Barat	Kec. Liang Anggan	Kab. Banjarbaru	HR, posluhutdes		
3	Jamur Sejahtera	Ds. Landasan Ulin Barat	Kec. Liang Anggan	Kab. Banjarbaru	HHBK (Jamur)		
4	Pucuk Mekar	Ds. Lok Tanah	Kec. Beuntung	Kab. Banjar	HR, HHBK		
5	Tunas Harapan	Ds. Sumber Mulia	Kec. Pelaihari	Kab. Tanah Laut	HR, HHBK (lebah madu)		
6	Ingin Maju	Ds. Tebing Siring	Kec. Bejuin	Kab. Tanah Laut	HKM, KBR, HTR		
7	Hidup Baru	Ds. Telaga	Kec. Pelaihari	Kab. Tanah Laut	HR, KBR, RHL		
<b>14</b>	<b>SULAWESI UTARA</b>						<b>13</b>
1	Sumber Rejeki	Ds. Pangu II	Kec. Ratahan Timur	Kab. Minahasa Tenggara	HR, agroforestry	Irene Ch. Mandang, S.Hut	
2	Tani Lestari	Ds. Boyong Pante	Kec. Sinon Sayang	Kab. Minahasa Selatan	HR, agroforestry	Leni Rorin, S.Hut	
3	Tani Matuari	Ds. Rumoong Atas II	Kec. Tareran	Kab. Minahasa Selatan	HR, agroforestry	verra C.R. Linelejan, S.Hut	
4	Bangkuna	Ds. Moyatodulan	Kec. Kota Mobagu Timur	Kota Mobagu	HR, agroforestry	Windawatiluli, S.Hut	
5	Tapalinow	Ds. Tapadaka Utara	Kec. Dumoga Tenggara	Kab. Bolaang Mongondow	HR, agroforestry	Basyiruddin M.A. S., S.Hut	
6	Ambang Jaya	Ds. Moyong Kota	Kec. Modayang Barat	Kab. B. Mongondow Timur	HR, agroforestry	Abdul Rizal M, S.Hut	
7	Gaharu	Ds. Purworejo	Kec. Modayang	Kab. B. Mongondow Timur	HR, agroforestry	Iwan Mokoginto, S.Hut	
8	Jaya Sakti	Ds. Salomo Barat	Kec. Bolaang Uki	Kab. B. Mongondow Seltn	HR, agroforestry	I Ketut Astawa	
9	Meimo	Ds. Karondoran	Kec. Ranowulu	Kab. Bitung	HR, agroforestry	Syahril Yusuf, S.Hut	
10	Maesaan	Ds. Kayawu	Kec. Tumohon Utara	Kab. Tomohon	HR, agroforestry	Mantje J. Sumolang	
11	Mahwoondo	Ds. Tara tara I	Tomohon Barat	Kab. Tomohon	HR, agroforestry	Jaffray W.P. Moningga	

NO.	Nama KTH	ALAMAT KTH			Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH	JML KTH
		DESA/KEL.	KECAMATAN	KABUPATEN			
12	Bina Swadaya Mandiri	Ds. Kimka Atas	Mapanget	Kab. Manado	HR, agroforestry	Domianusmanaya, S.Hut	
13	Pangintoyan Jaya	Ds. Talelu Rondor	Kec. Dimembe	Kab. Minahasa Utara	HR, agroforestry	Dezi Rande	
<b>15</b>	<b>SULAWESI TENGAH</b>						<b>6</b>
1	Suka Makmur	Ds. Sausu Torono	Kec. Sausu	Kab. Parigi Mountong			
2	Sari Madu	Ds. Sausu Tambu	Kec. Sausu	Kab. Parigi Mountong			
3	Mekar Jaya	Ds. Toini	Kec. Poso Pesisir	Kab. Poso			
4	Lembah Jongi	Ds. Uebone	Kec. Ampana Tete	Kab. Tojo Una-Una			
5	Bulu Teladan	Ds. Hion	Kec. Bunta	Kab. Banggai			
6	Mitra Membangun	Ds. Malangga	Kec. Galang	Kab. Toli-Toli			
<b>16</b>	<b>SULAWESI SELATAN</b>						<b>15</b>
1	Lereng Hijau	Binuang	Balusu	Barru		Erni Azis, S.Hut	
2	Samaturu	Bana	Bontocani	Bone		Syarkawi	
3	Saromase	Anrang	Rilau Ale	Bulukumba		Haeruddin	
4	Mattongan-Tongan	Cendana	Karrang	Enrekang		A. Satriani, S.Hut	
5	Sipakainga	Parigi	Tinggimoncong	Gowa		Sampara, S.Hut	
6	Limapa Subur	Lonjoboko	Parangloe	Gowa		Abd. Rauf	
7	Permata Hijau	Kapita	Bangkala	Jeneponto		Subaedah, SP	
8	Malela Lestari	Malela	Suli	Luwu		Habang	
9	Kencana Trigona	Lewonu	Burau	Luwu Timur		Abd. Samad Suhaeb	
10	Situju	Sassa	Baebunta	Luwu Utara		Diah Mustika, S.Hut, MP	
11	Chulande Sipatuo	Ulusaddang	Lembang	Pinrang		Muh. Hatta	
12	Hijau Maruddani	Lappa	Sinjai Utara	Sinjai		A. Rusdianty, S.Hut	
13	Bua Tanah	Bua	Tellulimpoe	Sinjai		Eka Mardiana Mardin, S.Hut	
14	Anrangae	Marioritenga	Marioriwawo	Soppeng		Ir. Idris	
15	Panre Badong	Barugaya	Polombangkeng Utara	Takalar		Mappaturung, S.Hut	
<b>17</b>	<b>SULAWESI TENGGARA</b>						<b>17</b>
1	Mepokuaso	Ds. Tobimeita	Kec. Abeli	Kab. Kendari	Penanaman	Drs. Somba Peiter	
2	Meohai	Ds. Oneiwila	Kec. Ranomeeto	Kab. Kendari	Lebah madu	Uniar, S.Tp	
3	Aopa Hijau	Ds. Aopa	Kec. Angata	Kab. Konawe Selatan	HR	Rokibah	
4	Mata Oleo	Ds. Amoito Jaya	Kec. Wolasi	Kab. Konawe Selatan	HR, Agroforestry	Faklun	
5	Madu Sari	Ds. Lalonggapu	Kec. Landono	Kotab. Konawe Selatan	Lebah Madu	Uniar, S.Tp	
6	Wana Sejuk	Ds. Kakenauwe	Kec. Lasalimo	Kab. Buton	Hutan Rakyat	M. Armin Rasyid	
7	Melati	Ds. Wansugi	Kec. Kabangka	Kab. Muna	HR, Pembibitan	La Tolo, S.Ag	
8	Lembo Modea	Ds. Lakologou	Kec. Tongkuno	Kab. Muna	Penanaman, Pembibitan	La Nduhu	
9	Sangia Jaya	Ds. Kabangka	Kec. Kabangka	Kab. Muna	Penanaman, Pembibitan	Laode Foni, S.hut	
10	Baru Terbit	Ds. Bengkali Barat	Kec. Watopute	Kab. Muna	Agroforestry	La Rato	
11	Rimba Raya	Ds. Rumbia	Kec. Lameroro	Kab. Bombana	HR, Lebah Madu	Siti Arnidar, S.Hut	
12	La Lemo	Ds. Ladumpi	Kec. Rowatu	Kab. Bombana	HR, Lebah Madu	Suhaeda, S.Hut	
13	Buana Lestari I	Ds. Watalara	Kec. Baula	Kab. Kolaka	Pembibitan	Paulina Pakeding	
14	Buana Lestari II	Ds. Watalara	Kec. Baula	Kab. Kolaka	HR	Daria DjumiatiSumalu	
15	Mehiya	Ds. Batu Gong	Kec. Lalonggasu Meeto	Kab. Konawe	HR, Pembibitan	Tatang Hadianto	
16	Bumi Segar	Ds. Lamendora	Kec. Kapoiala	Kab. Konawe	Agroforestry	Tatanh Hadianto	

NO.	Nama KTH	ALAMAT KTH			Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH	JML KTH
		DESA/KEL.	KECAMATAN	KABUPATEN			
17	Transparan	Ds. Wawo Sanggula	Kec. Puriala	Kab. Konawe	Pembibitan	Lolang Lolopayung	
<b>18</b>	<b>GORONTALO</b>						16
1	Polohungo	Kel. Leato	Kec. Dumbo Raya	Kota. Gorontalo	HR, Agroforestry	IndrahayuMakalunsenge,S.Hut	
2	Alam Bulota	Kel. Bulota	Kec. Limboto	Kab. Gorontalo Utara	Agroforestry, Tan. Kehutanan	Yusuf Tasmu	
3	Wana Tani	Kel. Polohungo	Kec. Limboto	Kab. Gorontalo	Agroforestry, Tan. Kehutanan	Yusuf Tasmu	
4	Gotong Royong	Ds. Dulamayo	Kec. Telaga	Kab. Gorontalo	Agroforestry, Pembibitan	Asfariyanti, S.Hut	
5	Botu Kadera	Ds. Toyidito	Kec. Polubala	Kab. Gorontalo	HR, Agroforestry	Asfariyanti, S.Hut	
6	Mentari	Ds. Batu Loreng	Kec. Bongomeme	Kab. Gorontalo	Aren, cengkeh,	DeyefiFora LaodeS.Hut	
7	Gunung Putih	Ds. Tiohu	Kec. Asparaga	Kab. Gorontalo	HTR,MPTS	Hamzah Usman, S.Hut	
8	Hula Walu	Ds. Bukit Aren	Kec. Pulubala	Kab. Gorontalo	Aren	Masrori Sahlan	
9	Mitra Lestari	Ds. Molamahu	Kec. Paguat	Kab. Pahuwoto	Lebah madu	Sandi Safril, S.Hut	
10	Tanjung Harapan	Ds. Bulili	Kec. Duhlada	Kab. Pahuwoto	Mangrovf, MPTS	Roys Hamani, S.Hut	
11	Rimba Lestastari	Ds. Meranti	Kec. Tapa	Kab. Bone Bolango	Pembibitan, MPTS	Ibrahim Van Gobel	
12	Huyula	Ds. Tanjung Karang	Kec. Tomilito	Kab. Gorontalo Utara	Pebibitan, Agroforestry	Rati PetrusTammu, S.Hut	
13	Tinemba	Ds. Pinontoyonga	Kec. Atinggola	Kab. Gorontalo Utara	Pembibitan Tan. Kehutanan	Susanti Dukalang, S.Hut	
14	Mawar	Ds. Tologia	Kec. Anggrek	Kab. Gorontalo Utara	Pembibitan	Wa Ode Nurfiati, S.Hut	
15	Sangsibar	Ds. Sigaso	Kec. Atinggola	Kab. Gorontalo Utara	MPTS, cengkeh, tan Kehutanan	Nurizati, S.Hut	
16	Sinar Emas V	Ds. Hiyalo	Kec. Anggrek	Kab. Gorontalo Utara	HR, Agroforestry	Viki Sastro Sulaeman,S.Hut	
<b>19</b>	<b>SULAWESI BARAT</b>						10
1	Puncak Indah	Ds. Botteng	Kec. Simboro	Kab. Mamuju	Hutan Rakyat	Ahmad	
2	Lekopa'dis	Ds. Mossodua	Kec. Sendana	Kab. Majene	Pembibitan Tan. Kehutanan	Amiruddin, SP	
3	Bunga Sulbar II	Ds. Binanga	Kec. Sendana	Kab. Majene	Ternak Lebah Madu	Syamsudin Matte	
4	Rimba Mangrove	Ds. Binanga	Kec. Sendana	Kab. Majene	Tanaman Mangrove	Azil Anwar	
5	Tuna Harapan II	Ds. Seppong	Kec. Tammerodo	Kab. Majene	Pembibitan Tan. Kehutanan	Basrum R	
6	Karya Bersama	Ds. Ongko	Kec. Campalagian	Kab. Polewali Mandar	Hutan Rakyat	Toni Sultoni, SP	
7	Siamasei	Ds. Tenggelang	Kec. Luyo	Kab. Polewali Mandar	Pembibitan Tan. Kehutanan	Ordanus, S.Hut	
8	Cinna Situru	Ds. Tuttula	Kec. Tapango	Kab. Polewali Mandar	Gula Aren	Utoyo	
9	Buttu Kayang	Ds. Alu	Kec. Alu	Kab. Polewali Mandar	Hutan Tan. Rakyat	Saharuddin, S.Hut	
10	Kanaan	Ds. Rippung	Kec. Messawa	Kab. Mamasa	Hutan Rakyat	Markus P	
<b>20</b>	<b>MALUKU</b>						4
1	Sumberwiji	Ds. Waemetal	Kec. Kairatu	Kab. Seram Barat	Pembibitan	Pembibitan	
2	Harapan Jaya	Ds. NaKahena	Seram Barat	Kab. Seram Barat	Pembibitan	Pembibitan	
3	Nakahena	Ds.Lumoli	Seram Barat	Kab. Seram Barat	Pembibitan	Pembibitan	
4	Waisamu	Ds. Waisamu	Kairatu Barat	Kab. Seram Barat	Pembibitan	Pembibitan	
<b>21</b>	<b>MALUKU UTARA</b>						8
1	Basanohi	Ds. Way Ipa/Sarana	Kec. Sarana	Kab. Tidore	Pengemb Jati		
2	Yana Kamdua	Ds. Bega	Kec. Sulabesi Tengah	Kab. Tidore	Pengemb Jati		
3	Ruba Hongi	Ds.Ds. Maliaro	Kec. Ternate	Kota Ternate	Tan. kayu2an,madu, cengkeh		
4	Makugawena	Ds. Takone	Kec. Pulau Ternate	Kab. Pulau Ternate Tengah	Agroforestry,Jasling,Ternak		
5	Mau Sigaro	Ds. Gamsungi	Kec. Sahu Timur	Kab. Halmahera Barat	Tanaman hutan		
6	Iyo Nongoru	Ds. Saria	Kec. Jailolo	Kab. Halmahera Barat	HR		
7	Maku Dudara	Ds. Fanaha	Kec. Oba Tengah	Kab. Sula	HKm		

NO.	Nama KTH	ALAMAT KTH			Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH	JML KTH
		DESA/KEL.	KECAMATAN	KABUPATEN			
8	Pesisir Hijau Lestari	Somahude	Kec. Oba Utara	Kab. Sula	Samama,kenari,pala,cengkeh dll		
<b>22</b>	<b>BALI</b>						7
1	Capalau	Ds. Abang	Kec. Abang	Kab. Karangasem	Suharyono	Pupuk org, lebah madu	
2	Sari Kasih	Ds. Tenganan	Kec. Manggis	Kab. Karangasem	Supardi, SP	bibit gamelina	
3	Wana Lestari	Ds. Kawuw	Kec. Mengwi	Kab. Badung	I Nyoman Jaya, SP	Gemelina, albesia	
4	Giri Kerta Sari	Ds. Tukadaya	Kec. Mendoyo	Jembrana	I Nyoman Kardi	Hutan Rakyat albesia	
5	Tri Guna Karya	Ds. Catur	Kec. Kintamani	Kab. Bangli	I Putu Sudiarta, SP	Hutan Rakyat Albesia	
6	Wana Kerti	Ds. Bontihing	Kec. Kubutambahan	Kab. Buleleng	Putu Agus Murjadi	Pemb. Pupuk Pst, Lebah madu	
7	Pondok Madu	Ds. Gadungan	Kec. Selemadeg Timur	Kab. Tabanan	I Nyoman Arsadana	Lebah madu	
<b>23</b>	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>						9
1	Hidup Jaya	Ds. Giri Madia	Kec. Lingsar	Kab. Lombok Barat	HKm, HR	HKm, HR	
2	Lampak Apik	Ds. Plambik	Kec. Praya Barat Daya	Lombok Tengah	HR, HKm	HR, HKm	
3	Dongo Baru	Ds. Sapit	Kec. Suela	Kab. Lombok Timur	Pisang, Hkm, Ternak	Pisang, Hkm, Ternak	
4	Sinar Harapan	Ds. Pendua	Kec. Kayangan	Kab. Lombok Utara	HKm, HR	HKm, HR	
5	Sahabat Bumi	Ds. Banjar	Kec. Taliwang	Kab. Sumbawa Barat	HKm, HR	HKm, HR	
6	Semongkat Makmur	Ds. Klungkung	Kec. Batu Lanteh	Kab. Sumbawa	Polowijo, Mente	Polowijo, Mente	
7	Meci Angi	Ds. Riwo	Kec. Woja	Kab. Dompu	HKm, HR, Mente	HKm, HR, Mente	
8	So Sanao	Ds. Kolo	Kec. Asa kota	Kota Bima	Mente, HR	Mente, HR	
9	Oi Loa	Ds. Runggu	Kec. Belo	Kab. Bima	Mente, HR	Mente, HR	
<b>24</b>	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>						10
1	Se Siwonok	Ds. Ds. Nailang	Kec. Alor Timur Laut	Kab. Alor	Agroforestry,HTR	Yohanis Saulus	
2	Dian Lestari	Ds. Kupidil	Kec. Kabola	Kab. Alor	HR, tanaman buah alpokat	Sunardi	
3	Tenangel	Ds. Lendola	Kec. Teluk Mutiara	Kab. Alor	Tan. Kayu2an	Siti QomariahHansumar	
4	Tere Eno	Ds. Air Kenari	Kec. Teluk Mutiara	Kab. Alor	Ternak,agroforestry	Siti QomariahHansumar	
5	Harapan Baru	Ds. Yoel Llu	Kec. Pantar Timur	Kab. Alor	Hkm, tan kayu2an	YohanisAmos Awu	
6	Sinar Baupung	Ds. Luba	Kec. Sembur	Kab. Alor	Tan kayu2an,kemiri,buah2an	Raymundus Sengga	
7	Gunung Kenari	Ds. Lembur Timur	Kec. Sembur	Kab. Alor	Tan kemiri,kayu2an	Raymundus Sengga	
8	Wang Miti	Ds. Kelaisi Tengah	Kec. Alor Selatan	Kab. Alor	Buah2an, kemiri	Dodi Hartadi Orasetya	
9	Helanuki	Ds. Kelaisi Barat	Kec. Alor Selatan	Kab. Alor	HR, tanaman buah alpokat	Dodi Hartadi Orasetya	
10	Usaha Bersama	Ds. Madar	Kec. Pantar	Kab. Alor	Buah2an, kemiri	Johanis Amos, S.Hut	
<b>25</b>	<b>PAPUA</b>						3
<b>1</b>	Aneka Jaya	Ds. Kaimana	Kec. Kaisera	Kab. Kepulauan Yapen		Obet NS Kayani	
<b>2</b>	Remang	Ds. Kampung Babongkrok	Kec. Kebungfeo	Kab. Jayapura	Agroforestry, pembibitan dan rehabilitasi lahan	Margaret Suebu	
<b>3</b>	Dadi Makmur			Kab. Kerum			
Jumlah KTH							255

Lampiran 4. Rincian peningkatan Kelas KTH dampak regulasi

NO.	Nama KTH	ALAMAT KTH			PROPINSI
		DESA/KEL.	KECAMATAN	KABUPATEN	
1	KTH Simehate	Desa Damar Mulyo	Kec. Atu Lintang	Kab. Aceh Tengah	ACEH
2	MPA Gampong Pasie Lembang	Desa/Gampong Pasie Lembang	Kecamatan Kluet	Aceh Selatan	ACEH
3	KTH Karya Bakti Melanting	Banjardinas Telenggan, Desa Gegelan	Kec. Manggis	Kab. Karangasem	Bali
4	Wanita Tani	Desa Jangkang Barat	Kec.Dendang	Kab. Belitung Timur	Bangka Belitung
5	KTH Tunas Baru	Desa Sumber Urip	Kec. Selupu Rejang	Kab. Rejang Lebong	Bengkulu
6	KTH Huyula	Desa Tanjung Karang	Kecamatan Tomilito	Kabupaten Gorontalo Utara	Gorontalo
7	KTH Jeruk Manis	Desa Talang Lindung	Kec. Sungai Bungkal	Kota Sungai Penuh	JAMBI
8	Maju	Desa Catur Usaha	Kecamatan Dendang	Tanjab Timur	JAMBI
9	Sugih Mukti	Desa Catur Usaha	Kec. Dendang	Tanjab Timur	JAMBI
10	Mencolok II	Dusun Mencolok Laut, Desa Mencolok	kec. Mendahara Ulu	Tanjab Timur	JAMBI
11	GIRI SENANG	Kampung Legok Nyenang, Desa Girimekar	Kec. Cilengkrang	Kab. Bandung	JAWA BARAT
12	Poncol	Sukahati	Cibinong	Bogor	JAWA BARAT
13	Setu	leuwikutug	Citeureup	Bogor	JAWA BARAT
14	Karunia Alam	Gn.Guelis	Sukaraja	Bogor	JAWA BARAT
15	Jaya Tani	Cilebut Barat	Sukaraja	Bogor	JAWA BARAT
16	putaharapan1	Karang Tengah	Babakan Madang	Bogor	JAWA BARAT
17	putaharapan2	Karang Tengah	Babakan Madang	Bogor	JAWA BARAT
18	Cisewu 1	Balekambang	Jonggol	Bogor	JAWA BARAT
19	Leuwijati	Sukanegara	Jonggol	Bogor	JAWA BARAT
20	Karya mekar	Dayeuh	Cileungsi	Bogor	JAWA BARAT
21	Lestari	Limus nunggal	Cileungsi	Bogor	JAWA BARAT
22	Nilem	Sukamakmur	Sukamakmur	Bogor	JAWA BARAT
23	Jembar Tani	Pabuaran	Sukamakmur	Bogor	JAWA BARAT
24	Mawar	Cibadak	Sukamakmur	Bogor	JAWA BARAT
25	Bambu Duri	Cimanggis	Bojong Gede	Bogor	JAWA BARAT
26	Sepakat	Benteng	Ciampea	Bogor	JAWA BARAT

NO.	Nama KTH	ALAMAT KTH			PROPINSI
		DESA/KEL.	KECAMATAN	KABUPATEN	
27	Alam Lestari	Gunung Picung	Pamijahan	Bogor	JAWA BARAT
28	Riung Gunung	Pasarean	Pamijahan	Bogor	JAWA BARAT
29	Hutan Rumpin Indah	Rumpin	Rumpin	Bogor	JAWA BARAT
30	Karang Sari	Jugala Jaya	Jasinga	Bogor	JAWA BARAT
31	Jabon Lestari	Parung Panjang	Parung Panjang	Bogor	JAWA BARAT
32	Model Desa	Jatiroke	Jatinangor	Sumedang	JAWA BARAT
33	Gerbang Tandu	Cikahuripan	Cimanggung	Sumedang	JAWA BARAT
34	CYGP	Pamulihan	Pamulihan	Sumedang	JAWA BARAT
35	Mekar Harapan	Cimarias	Pamulihan	Sumedang	JAWA BARAT
36	Bidak	Rancakalong	Rancakalong	Sumedang	JAWA BARAT
37	Sukabirus	Cibunar	Rancakalong	Sumedang	JAWA BARAT
38	Mekar Jaya	Pamekaran	Rancakalong	Sumedang	JAWA BARAT
39	Wana Lestari	Cipameungpeuk	Sumedang Selatan	Sumedang	JAWA BARAT
40	Sugih Mukti	Ciherang	Sumedang Selatan	Sumedang	JAWA BARAT
41	Bina Mukti	Baginda	Sumedang Selatan	Sumedang	JAWA BARAT
42	Asri	Cipancar	Sumedang Selatan	Sumedang	JAWA BARAT
43	Sariwangi	Naluk	Cimalaka	Sumedang	JAWA BARAT
44	Putra Cipipisan	Cigintung	Cisitu	Sumedang	JAWA BARAT
45	Cibuntulang	Dayeuh Luhur	Ganeas	Sumedang	JAWA BARAT
46	Hidup Rukun	Cikondang	Ganeas	Sumedang	JAWA BARAT
47	Rawayan	Cisalak	Cisarua	Sumedang	JAWA BARAT
48	Jembar Rahayu	Cijambe	Paseh	Sumedang	JAWA BARAT
49	Situsari Mandiri	Tolengas	Tomo	Sumedang	JAWA BARAT
50	Mitra Anugrah	Cigentur	Tanjungkerta	Sumedang	JAWA BARAT
51	Sri Tanjung	Tanjungwangi	Tanjungmedar	Sumedang	JAWA BARAT
52	Nambo	Cikeusik	CIDAHU	Kuningan	JAWA BARAT
53	Baktimandiri	Bandorasakulon	Cilimus	Kuningan	JAWA BARAT

NO.	Nama KTH	ALAMAT KTH			PROPINSI
		DESA/KEL.	KECAMATAN	KABUPATEN	
54	Sangkanrindang	Sangkanerang	Jalaksana	Kuningan	JAWA BARAT
55	Kembanghari	Bangunjaya	SUBANG	Kuningan	JAWA BARAT
56	Harapan Mulya	Puncak	Cigugur	Kuningan	JAWA BARAT
57	Harapan Mukti	Ds. Cibereum Dsn. Cibadak	Banjarsari	Ciamis	JAWA BARAT
58	Bina Lestari	Ds. Sindangsari Dsn. Banjaranyar	Banjarsari	Ciamis	JAWA BARAT
59	Maribaya Motekar Farm	Dusun Pasirkadu Desa Petirhilir	Baregbeg	Ciamis	JAWA BARAT
60	Sugema	Dsn. Pancak Asih Ds. Cisadap	Ciamis	Ciamis	JAWA BARAT
61	Balebat.II	Ds. Dewasari Dsn. Cidewa	Cijeungjing	Ciamis	JAWA BARAT
62	Balebat	Ds. Karanganyar Dsn. Bandaruka	Cijeungjing	Ciamis	JAWA BARAT
63	Empang Kulon	Ds. Jayakarsa Dsn. Pasirgantung	Cimaragas	Ciamis	JAWA BARAT
64	Margawiwitan IV	Ds. Sagalaherang Dsn. Situgede	Panawangan	Ciamis	JAWA BARAT
65	Ligar Binangkit	Sikluk,Sandingtaman	Panjalu	Ciamis	JAWA BARAT
66	Haur Kuning	Ds. Karangpaningal Dsn. Langgen	Purwadadi	Ciamis	JAWA BARAT
67	Jati Makmur	Citepus	Palabuhanratu	Sukabumi	JAWA BARAT
68	Babakan Wareng	Cidadap	Simpenan	Sukabumi	JAWA BARAT
69	Bina Usaha	Mangunjaya	Bantargadung	Sukabumi	JAWA BARAT
70	Cipanca	Bantargebang	Bantargadung	Sukabumi	JAWA BARAT
71	Sadewa	Pasirbaru	Cisolok	Sukabumi	JAWA BARAT
72	Mawar Cipanas	Gunungkaramat	Cisolok	Sukabumi	JAWA BARAT
73	Bantar Lopang	Gunungmalang	Cikidang	Sukabumi	JAWA BARAT
74	Guna Mekar 2	Jampangtengah	Jampangtengah	Sukabumi	JAWA BARAT
75	Saluyu 2	Nangerang	Jampangtengah	Sukabumi	JAWA BARAT
76	Giri Jaya	Warnajati	Cibadak	Sukabumi	JAWA BARAT
77	Sutera Cijedil	Cijedil	Cugenang	Cianjur	JAWA BARAT
78	Tani Mukti Jaya	Wangun	Campaka	Cianjur	JAWA BARAT
79	Mawa Harepan	Cibiru Wetan	Cileunyi	Bandung	JAWA BARAT
80	Giri Senang	Giri Mekar	Cimenyan	Bandung	JAWA BARAT

NO.	Nama KTH	ALAMAT KTH			PROPINSI
		DESA/KEL.	KECAMATAN	KABUPATEN	
81	Mitra Tani	Banjaran Wetan	Banjaran	Bandung	JAWA BARAT
82	Mitra Tani	Lamajang	Pangalengan	Bandung	JAWA BARAT
83	Guruminda	Arjasari	Arjasari	Bandung	JAWA BARAT
84	Manggu Manis	Arjasari	Arjasari	Bandung	JAWA BARAT
85	Mandala VII	Mandalasari	Cikancung	Bandung	JAWA BARAT
86	Girimukti	Sukanagara	Soreang	Bandung	JAWA BARAT
87	Mitra Usaha	Cikujang	Serangpanjang	Subang	JAWA BARAT
88	Mekar Mukti	Babakan Jawa	Majalengka	Majalengka	JAWA BARAT
89	Sunagara	Borogojol	Lemahsugih	Majalengka	JAWA BARAT
90	Bukit Ciremai	Cikaracak	Argapura	Majalengka	JAWA BARAT
91	Bojong	Cingambul	Cingambul	Majalengka	JAWA BARAT
92	Bina Harapan	Panambangan	Sedong	Cirebon	JAWA BARAT
93	Mekar Sari	Sumurkondang	Karangwareng	Cirebon	JAWA BARAT
94	Sutiyah Mekar	Waled Asem	Waled	Cirebon	JAWA BARAT
95	Tunas Harapan	Caringin	Karang Tengah	Garut	JAWA BARAT
96	Itikurih	Padasuka	Cibatu	Garut	JAWA BARAT
97	Sari Asih	Kertaharja	Cimerak	Pangandaran	JAWA BARAT
98	Bina Karya I	Cimindi	Cigugur	Pangandaran	JAWA BARAT
99	SPKP Merapi	Desa Ngargomulyo	Kecamatan Dukun	Magelang	JAWA TENGAH
100	KMPHP Manggrove Sari	Dukuh Pandan Sari, Desa Kaliwlingi	Kec.Brebes	Kab. Brebes	JAWA TENGAH
101	Wono Lestari	Desa Sumber Urip	Kecamatan Pronojiwo	Lumajang	JAWA TIMUR
102	KTH Sumber Makmur	Desa Sumberjati	Kec. Tempeh	Kab. Lumajang	JAWA TIMUR
103	Rizqi Abadi	Kradinan	Dolopo	Madiun	JAWA TIMUR
104	Sumber Rejeki	Glonggong	Dolopo	Madiun	JAWA TIMUR
105	Wono Mulyo	Suluk	Dolopo	Madiun	JAWA TIMUR
106	Wono Dadi	Bader	Dolopo	Madiun	JAWA TIMUR
107	Wono Salam	Dagangan	Dagangan	Madiun	JAWA TIMUR

NO.	Nama KTH	ALAMAT KTH			PROPINSI
		DESA/KEL.	KECAMATAN	KABUPATEN	
108	Mekar Agung	Kepet	Dagangan	Madiun	JAWA TIMUR
109	Jati Mulyo	Klumutan	Saradan	Madiun	JAWA TIMUR
110	Tani Mulyo	Kaliabu	Mejayan	Madiun	JAWA TIMUR
111	Jati Mulyo	Wonorejo	Mejayan	Madiun	JAWA TIMUR
112	Tani Mulyo	Kebonagung	Mejayan	Madiun	JAWA TIMUR
113	Asih Wono	Bambang	Wajak	Malang	JAWA TIMUR
114	Sari Tani	Dadapan	Wajak	Malang	JAWA TIMUR
115	Rahayu	Dawuhan	Poncokusumo	Malang	JAWA TIMUR
116	Tani Sejahtera	Taman Satriyan	Tirtoyudo	Malang	JAWA TIMUR
117	Sbr. Rejeki	Wonoagung	Tirtoyudo	Malang	JAWA TIMUR
118	Margo Makmur	Sbr. tangkil	Tirtoyudo	Malang	JAWA TIMUR
119	Karya Makmur	Wonoagung	Tirtoyudo	Malang	JAWA TIMUR
120	Bina Sejahtera	Pujiarjo	Tirtoyudo	Malang	JAWA TIMUR
121	Makmur	Purwodadi	Tirtoyudo	Malang	JAWA TIMUR
122	Tani makmur	Bumirejo	Dampit	Malang	JAWA TIMUR
123	Bumi Makmur	Baturetno	Dampit	Malang	JAWA TIMUR
124	Langgeng Lestari	Srimulyo	Dampit	Malang	JAWA TIMUR
125	Wonokoyo	Jambangan	Dampit	Malang	JAWA TIMUR
126	Kopi Sari	Plaosan	Wonosari	Malang	JAWA TIMUR
127	Tri Tunggal Lestari	Sindurejo	Gedangan	Malang	JAWA TIMUR
128	Sido bares II	Sumberejo	Gedangan	Malang	JAWA TIMUR
129	Sumber Rejeki	Sidodadi	Gedangan	Malang	JAWA TIMUR
130	Makmur	Ngadirejo	Kromengan	Malang	JAWA TIMUR
131	Karya	Peniwen	Kromengan	Malang	JAWA TIMUR
132	Budi Luhur	Karangrejo	Kromengan	Malang	JAWA TIMUR
133	Mekar Tani	Jambuwer	Kromengan	Malang	JAWA TIMUR
134	Sido Makmur	Petungsewu	Wagir	Malang	JAWA TIMUR

NO.	Nama KTH	ALAMAT KTH			PROPINSI
		DESA/KEL.	KECAMATAN	KABUPATEN	
135	Seger	Sukodadi	Wagir	Malang	JAWA TIMUR
136	Tekat	Sumberpetung	Kalipare	Malang	JAWA TIMUR
137	Giri Mulyo	Tumpakrejo	Kalipare	Malang	JAWA TIMUR
138	Jati Lestari	Arjosari	Kalipare	Malang	JAWA TIMUR
139	Rukun Tani	Kalipare	Kalipare	Malang	JAWA TIMUR
140	Sumber Wana Abadi	Sumberoto	Donomulyo	Malang	JAWA TIMUR
141	Nekat	Purworejo	Donomulyo	Malang	JAWA TIMUR
142	Rimba Alam	Purwodadi	Donomulyo	Malang	JAWA TIMUR
143	Tri Tunggal	Mentara man	Donomulyo	Malang	JAWA TIMUR
144	Wana Lestari	Kedungsalam	Donomulyo	Malang	JAWA TIMUR
145	Sido Mulyo Asri	Tlogosari	Donomulyo	Malang	JAWA TIMUR
146	Raharjo	Tulusbesar	Tumpang	Malang	JAWA TIMUR
147	Rukun Makmur	Duwet Krajan	Tumpang	Malang	JAWA TIMUR
148	Sumberrejekki V	Donowarih	Karangploso	Malang	JAWA TIMUR
149	Maju	Bocek	Karangploso	Malang	JAWA TIMUR
150	Budidaya	Tawangargo	Karangploso	Malang	JAWA TIMUR
151	Mekar Lestari	Pait	Kasembon	Malang	JAWA TIMUR
152	Sumber Makmur	Sumbera gung	Sumberman jing Wetan	Malang	JAWA TIMUR
153	Karya Makmur III	Druju	Sumberman jing Wetan	Malang	JAWA TIMUR
154	Wana Lestari	Babadan	Ngajum	Malang	JAWA TIMUR
155	Sumarah	Wiroteman	Ampelgading	Malang	JAWA TIMUR
156	Sari Murni	Sumberbe ning	Bantur	Malang	JAWA TIMUR
157	Alam Rimba	Rejosari	Bantur	Malang	JAWA TIMUR
158	Sumber Makmur	Jembul	Jatirejo	Mojokerto	JAWA TIMUR
159	Candi Sari	Sriwedari	Karanganyar	Ngawi	JAWA TIMUR
160	Wanatani	Margopatut	Sawahan	Nganjuk	JAWA TIMUR
161	Sidodadi	Bajulan	Loceret	Nganjuk	JAWA TIMUR

NO.	Nama KTH	ALAMAT KTH			PROPINSI
		DESA/KEL.	KECAMATAN	KABUPATEN	
162	Among Tani II	Joho	Pace	Nganjuk	JAWA TIMUR
163	Sumber Makmur	Manduro	Kabuh	Jombang	JAWA TIMUR
164	Seruni Madani	Desa Rasau Jaya Umum	Kec. Rasau Jaya	Kubu Raya	KALIMANTAN BARAT
165	Usaha Parit Latong	Dusun Parit Latong Desa Jungkat	Kec. Siantan	Kubu Raya	KALIMANTAN BARAT
166	Karya Tani Limbung	Dusun Mulyorejo Desa Limbung	Kec. Sungai Raya	Kubu Raya	KALIMANTAN BARAT
167	Aman Sentosa	Desa Sungai Awan Kiri	Kec. Muara Pawan	Ketapang	KALIMANTAN BARAT
168	Kayong Sejurai	Desa Naggatayap	Kec. Nagatayap	Kab. Ketapang	KALIMANTAN BARAT
169	KTH Simpai Alam	Desa Mandala	Kecamatan Telaga Langsat	Kab Hulu Sungai Selatan	KALIMANTAN SELATAN
170	Rimba Raya	Desa Belangian	Kec. Aranio	Banjar	KALIMANTAN SELATAN
171	Bunga Matahari	Desa Batung	Kec. Piani	Tapin	KALIMANTAN SELATAN
172	Berkat Usaha	Desa Kindingan	Kec. Hantakan	Hulu Sungai Tengah	KALIMANTAN SELATAN
173	Jaya Lestari	Desa Tarung Manuah	Kecamatan Basarang	Kapuas	KALIMANTAN TENGAH
174	Kelompok Nelayan Sungai Buluh	Desa Muara Dua	Kecamatan Seruyan hilir	Seruyan	KALIMANTAN TENGAH
175	Hosama	Kalawa	Kahayan Hilir	Pulang Pisau	KALIMANTAN TENGAH
176	Pangarawah	Tewah Pupuh	Banua Lima	Barito Timur	KALIMANTAN TENGAH
177	KTH Sari Makmur	Desa Toadaya Utara	Kec. Toadaya	Kab. Bintan	Kepulauan Riau
178	KTH Pesisir Hijau Lestari	Desa Soma Hode	Kec. Oba Utara	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara
179	KTH Rindu Alam	Desa Mekar Sari	Kec.Suela	Kab. Lombok Timur	NTB
180	KTH Ebu Mesu I	Rt.01, Rw.-, Dusun Bata, Desa Tiworiwu	Kec.Jerebu	Kab. Ngada	NTT
181	KTH Mekar Jaya	Desa Beringin Jaya	Kecamatan Singingi Hilir	Kab. Kuantan Singingi	RIAU
182	Berkah Bersama	Desa Petapahan	Kecamatan Tapung	Kampar	RIAU
183	Pemadam Jaya	Desa Air Hitam SPTN Wilayah I	Desa Air Hitam SPTN Wilayah I	Lubuk Kembang Bunga	RIAU
184	Halaman Kuyang Lestari	Desa Rumbio	Kecamatan Kampar	Kampar	RIAU
185	KTH Renggeang Mandiri	Desa Renggeang	Kec. Limboro	Kab. Polewali Mandar	Sulawesi Barat
186	KTH Mekar Jaya	Desa Taini	Kec. Poso Pesisir	Kab. Poso	Sulawesi Tengah
187	Aopa Hijau	Desa Aopa	Kec. Angata	Kab. Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
188	KTH Mandiri	Desa Poyowa Kecil	Kec. Kotamobagu Selatan	Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara

NO.	Nama KTH	ALAMAT KTH			PROPINSI
		DESA/KEL.	KECAMATAN	KABUPATEN	
189	KTH Karya Setia	Jorong Setia Nagari Simpang Tonang	Kecamatan Duo Koto	Kecamatan Duo Koto	Sumatera Barat
190	KTH Cerana	Desa Marga Puspita	Kec. Megang Sakti	Kab. Musi Rawas	Sumatera Selatan
191	Bukit Indah	Desa Muara Danau	Kec Semendo	Muara Enim	Sumatera Selatan
192	Harapan Baru	Kel Muara Kuang	Kec. Muara Kuang	Ogan Ilir	Sumatera Selatan
193	Meranti Jaya	Desa Muara Merang	Kec. Bayung Lencir	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
194	Sumber Rejeki	Desa Sebokor	Kecamatan Air Kumbang	Banyuasin	Sumatera Selatan
195	KTH Sada Ola Reboisasi	Desa Sukamakmur	Kec. Kutalimbaru	Kab. Deli Serdang	Sumatera Utara



## Lampiran 5. Rincian Terbentuknya Koperasi KTH

No	Nama KTH dan Bank Sampah	Alamat	Provinsi	Kegiatan/	Ketua	Pendamping Koperasi
1	KTH Lembah Hijau	Ds. Karang Dima, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	Lebah Madu Hutan, Pembibitan dan olahan HHKBK	Witarsa	Dharmansyah, SP
2	KTH Karang Bayan Lestari	Ds. Karang Bayan Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	Lebah Madu, gula aren	Suadi	Dewa Ngakan Putu Antara, SP
3	KTH Bina Harapan	Ds. Penambangan, kec. Sedong, Kab. Cirebon	Jawa Barat	Hutan Rakyat, PLBTH	Sukardi	Dede Rustaman, SP
4	KWT Dewi Sri	Ds. Bojongpicung, Kec. Bojongpicung, Kab. Cianjur	Jawa Barat	Cuka Kayu	Euis Maryati	Achmad Abdul Hakim, SP
5	KTH Tanah Abang	Desa Gisting Atas, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus	Lampung	Penyulingan minyak atsiri, bibit MPTS, HHBK	Supardi	Arif Sudaryono
6	KTH Wana Jaya	Ds. Sendang Baru, Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah	Lampung	Gula aren, kemiri, pinang	Marikun	Suhartono
7	KTH Sembodo	Dsn Kalibiru, Ds. Hargowilis Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo	D.I.Yogyakarta	Pengolahan empon-empon, wisata alam	Sumarjana	Suroso, SP
8	KTH Sumber Rejeki	Ds. Banaran 1, Ds. Banaran, Kec. Playen, Kab. Gunung Kidul	D.I.Yogyakarta	Lebah Madu	Purwanto	Widiyanto
9	KTH Lalayuan	Kel. Lahendong Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon	Sulawesi Utara	Gula Aren, HR, pengolahan etanol	Wellem Supit	Mantje Jopie Sumolang
10	KTH Wonoasri	Desa Kertosari. Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang	Jawa Timur	Penampungan dan penggergajian kayu (sawmill)	Sukiman	Nurhayadi, SP
11	KTH Rimba Mas	Desa Gerbo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan	Jawa Timur	Pembibitan, HR, Agroforestry, jahe instan, kopi bubuk, jamur tiram	Mulyadi	Suwandi, SP
12	KTH Sumber Makmur	Desa Manduro, Kec. Kabuh, Kab. Jombang	Jawa Timur	Budidaya tanaman hutan, penanaman bawah tegakan	Riono	Sudjarwo, SP
13	KTH Pancoran Lestari	Desa Mundeh Kec. Selemadeg Barat Kab. Tabanan	Bali	Agroforestry, HR, Pembibitan	I Putu Wirawan	I Ketut Gede Intan Kurniawan, S.Hut
14	KTH Maju Jaya	Ds. Tanjung Dalam, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong	Bengkulu	HKM	Bambang Irawan	Suroto
15	KTH Wana Lestari	Ds. Gunungsari, Kec. Tlogowungu, Kab. Pati	Jawa Tengah	Penggilingan/pengolahan kopi, ternak sapi dan kambing	Ngarjono	Sri Hastuti, SP

No	Nama KTH dan Bank Sampah	Alamat	Provinsi	Kegiatan/	Ketua	Pendamping Koperasi
16	KTH Ngudi Utomo	Ds. Sukorejo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali	Jawa Tengah	Jamur tiram, anyaman bambu, pembibitan, pupuk organik	Sarono	Kukuh Subiyanto, SP
17	KTH Sari Murni	Ds. Hatungun, Kec. Hatungun, Kab. Tapin	Kalimantan Selatan	Lebah madu, pembibitan, HR, PLBTH	Ibnu Kasir Al Aqili	Muhammad Ikhsan, SP
18	KTH Sejahtera Bersama	Desa Nusapati, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah	Kalimantan Barat	Lebah madu, gaharu, MPTS	Ahmadiyah Ham	Yanuar, SP
19	KTH Peureului Nanggroe	Ds. Pulo Gisa, Kec. Gandapura, Kab. Bireun	NAD	Silvopasture, HHBK pengolahan bambu	Muhammad Ali	Fauzah, S. Hut
20	KTH Aur Serumpun	Nagari Pasie Laweh, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman	Sumatera Barat	HKM, pembibitan, HHBK	Oyong Liza Arif	Jhoni Hendra, SP
21	Bank Sampah Gerakan Untuk Lingkungan (GAUL)	RW 16 Perumahan Bojong Depok Baru 2, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor	Jawa Barat	Penjualan limbah anorganik, kerajinan perca, bungkus kemasan minuman	Nurhasanah	Yuliana Rini DY, S. Pi, ME
22	Bank Sampah Untung Nabung Sampah (UNASA)	Bumi Pertiwi blok FF 2, Blok FG-10 RT 2 RW 14 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor	Jawa Barat	Daur ulang plastik dan pupuk cair	Isti Wahyuni	Dewi Sawiyah Prangesti
23	KSU Tetesan Embun*	Ilalang Panjang Indrapura, Kec. Airpura, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Sumatera Barat	Hutan Tanaman Rakyat	Safrizal	Otria, S. Hut
24	KTH Wana Mitra Koridor*	Desa Cipeuteuy, Kec. Kabandungan, Kab. Sukabumi	Jawa Barat	Hutan Rakyat dan Agroforestry	Dayat Hidayat	Entis Sutisna

Lampiran 6. Rincian Penempatan Rekrutmen Tenaga Bakti Rimbawan

No	Provinsi	Penempatan	2016			Total
			D3	S1	SMK	
1	Aceh	KPHK Lingga Isaq		1	2	3
2	Aceh	KPHK Pulau Weh		1	2	3
3	Aceh	KPHL Aceh (Unit II)		3	1	4
4	Aceh	KPHL Aceh (Unit IV)		3	2	5
5	Aceh	KPHL Aceh (Unit I)		4	2	6
6	Aceh	KPHL Aceh (Unit III)		3	3	6
7	Aceh	KPHL Aceh (Unit V)		3	3	6
8	Aceh	KPHL Aceh (Unit VI)		2	4	6
9	Bali	KPHL Bali Barat (Unit I)		1		1
10	Bali	KPHL Bali Timur (Unit III)		1		1
11	Bali	KPHK Bedugul-Sangeh	1	1	1	3
12	Bali	KPHK Kintamani/Batur-Panelokan	1	1	1	3
13	Bali	KPHL Bali Tengah (Unit II)		3		3
14	Bangka Belitung	KPHP Rambat Menduyung (Unit I)			4	4
15	Bangka Belitung	KPHP Sigambir-Kotawaringin (Unit IV)		2	2	4
16	Bangka Belitung	KPHP Sungai Sembulan	1	1	3	5
17	Bangka Belitung	KPHP Gunung Duren (Unit XIII)		2	4	6
18	Banten	KPHK Kepulauan Krakatau	1	1	1	3
19	Bengkulu	KPHK Bukit Kaba		1	2	3
20	Bengkulu	KPHK Enggano		1	2	3
21	Bengkulu	KPHP Muko-Muko		2	1	3
22	Bengkulu	KPHL Seluma Unit IV		1	4	5
23	DI Yogyakarta	KPHK Yogyakarta	1	1	1	3
24	DI Yogyakarta	KPHP Yogyakarta		4		4
25	DKI Jakarta	KPHK Jakarta	1	1	1	3
26	Gorontalo	KPHL Unit III Pohuwato		1	2	3
27	Gorontalo	KPHP Unit VII Bone Bolango Unit VII		3	2	5
28	Gorontalo	KPHP Boalemo (Unit V)		4	2	6
29	Jambi	KPHP Merangin (Bukit Lubuk Pekak-Hulu Landai)		1		1
30	Jambi	KPHK Durian Luncuk		1	2	3
31	Jambi	KPHK Hutan Bakau Pantai Timur		1	2	3
32	Jambi	KPHP Limau (Unit VII) Atau Unit VII Hulu		2	2	4
33	Jambi	KPHP Tebo Barat Unit IX		2	2	4
34	Jambi	KPHP Tebo Timur Unit X		2	2	4
35	Jawa Barat	KPHK Simpang Tilu	1	1	1	3
36	Jawa Barat	KPHK Tangkuban Perahu Burangrang	1	1	1	3
37	Jawa Tengah	KPHK Cilacap	1	1	1	3
38	Jawa Tengah	KPHK Pati Barat	1	1	1	3
39	Jawa Timur	KPHK Dataran Tinggi Yang		2	1	3
40	Jawa Timur	KPHK Kawah Ijen	1	1	1	3
41	Kalimantan Barat	KPHP Sintang (Sungai Marakai)		1		1

No	Provinsi	Penempatan	2016			Total
			D3	S1	SMK	
42	Kalimantan Barat	KPHP Belimbing Unit XXV		1	1	2
43	Kalimantan Barat	KPHP Kapuas Hulu (Unit XVIII Dan Unit XIX)		1	1	2
44	Kalimantan Barat	KPHP Kendawangan (Unit XxXII)		1	1	2
45	Kalimantan Barat	KPHK Muara Kendawang		1	2	3
46	Kalimantan Barat	KPHK Gunung Nyiut		2	2	4
47	Kalimantan Barat	KPHP Menukung Unit XXIII		2	3	5
48	Kalimantan Selatan	KPHK Kuala Lupak		1	1	2
49	Kalimantan Selatan	KPHL Hulu Sungai Selatan		2		2
50	Kalimantan Selatan	KPHP Banjar		1	1	2
51	Kalimantan Selatan	KPHP Pulau Laut Dan Sebuku (Unit III)			2	2
52	Kalimantan Selatan	KPHP Tanah Laut (Unit VII)		2		2
53	Kalimantan Selatan	KPHK Gunung Kentawan		1	2	3
54	Kalimantan Selatan	KPHP Tabalong (Unit V)			3	3
55	Kalimantan Selatan	KPHL Hulu Sungai Tengah Unit IX		1	3	4
56	Kalimantan Selatan	KPHP Tanah Bumbu Unit VI		2	3	5
57	Kalimantan Tengah	KPHP Barito Timur Unit XIV		1	1	2
58	Kalimantan Tengah	KPHP Lamandau (Unit XXIII)		1	1	2
59	Kalimantan Tengah	KPHK Lamandau		1	2	3
60	Kalimantan Tengah	KPHK Pararawen		2	1	3
61	Kalimantan Tengah	KPHL Kapuas		3		3
62	Kalimantan Tengah	KPHP Kotawaringin Timur Unit XXIX			3	3
63	Kalimantan Tengah	KPHP Barito Utara Unit V		2	3	5
64	Kalimantan Timur	KPHL Sungai Wein-Sungai Manggar Unit Xxx		1	1	2
65	Kalimantan Timur	KPHP Bongan		2		2
66	Kalimantan Timur	KPHP Santan		2		2
67	Kalimantan Timur	KPHK Muara Kaman Sedulang		1	2	3
68	Kalimantan Timur	KPHP Das Belayan		1	2	3
69	Kalimantan Timur	KPHP Delta Mahakam		2	1	3
70	Kalimantan Timur	KPHP Malinau (Unit X)		2	3	5
71	Kalimantan Utara	KPHL Tarakan		2	1	3
72	Lampung	KPHL Rajabasa (Unit XIV)		1		1
73	Lampung	KPHP Gedong Wani (Unit XVI)		1		1
74	Lampung	KPHP Muara Dua (Unit IV)		1		1
75	Lampung	KPHP Register 47 Way Terusan		1		1
76	Lampung	KPHL Gunung Balak Unit XV		1	3	4
77	Lampung	KPHL Liwa Unit II	1	1	2	4
78	Maluku	KPHP Wae Tina (Unit III)		1		1
79	Maluku	KPHK Sahuwai		1	2	3
80	Maluku	KPHK Taliabu		1	2	3
81	Maluku Utara	KPHP Unit IX Oba Unit IX		2	3	5
82	Nusa Tenggara Barat	KPHK Tambora			2	2
83	Nusa Tenggara Barat	KPHK Gunung Tunak	1	1	1	3

No	Provinsi	Penempatan	2016			Total
			D3	S1	SMK	
84	Nusa Tenggara Barat	KPHK Moyo	1	1	1	3
85	Nusa Tenggara Barat	KPHL Ampang Riwo Soromandi		1	2	3
86	Nusa Tenggara Barat	KPHL Rinjani Timur (Unit IV)		3		3
87	Nusa Tenggara Barat	KPHL Toffo Pajo Unit XVI		2	3	5
88	Nusa Tenggara Barat	KPHP Batulanteh (Unit IX)		5		5
89	Nusa Tenggara Barat	KPHP Madapangga Rompu Unit Xx	1	1	3	5
90	Nusa Tenggara Barat	KPHL Rinjani Barat		6	1	7
91	Nusa Tenggara Timur	KPHL Mutis Timau (Unit XIX)			2	2
92	Nusa Tenggara Timur	KPHP Ende Unit VI			2	2
93	Nusa Tenggara Timur	KPHK Gunung Mutis		1	2	3
94	Nusa Tenggara Timur	KPHK Harlu	1	1	1	3
95	Nusa Tenggara Timur	KPHL Belu Unit XXII		1	2	3
96	Nusa Tenggara Timur	KPHL Lembata Unit IX		1	3	4
97	Nusa Tenggara Timur	KPHL Manggarai Unit II	1		3	4
98	Nusa Tenggara Timur	KPHP Timor Tengah Utara Unit XXI		2	2	4
99	Nusa Tenggara Timur	KPHL Ngada (Unit IV)	1		5	6
100	Nusa Tenggara Timur	KPHP Rote Ndao		1	5	6
101	Papua	KPHP Waropen (Unit XVII)		1		1
102	Papua	KPHP Yapen			2	2
103	Papua	KPHK Cyclop - Teluk Youtefa		1	2	3
104	Papua	KPHK Nabire -Tj Wiay		1	2	3
105	Papua	KPHL Jayawijaya Unit XIII		1	3	4
106	Papua	KPHL Unit VI Mimika		1	3	4
107	Papua	KPHL Biak Numfor	1	2	2	5
108	Papua Barat	KPHP Sorong Selatan (Unit V)			1	1
109	Papua Barat	KPHP Bintuni Unit XV		1	1	2
110	Papua Barat	KPHK Beriat		1	2	3
111	Papua Barat	KPHK Sorong Klamono		1	3	4
112	Papua Barat	KPHP Sorong		3	1	4
113	Papua Barat	KPHL Raja Ampat Unit I		1	5	6
114	Riau	KPHK Kerumutan			2	2
115	Riau	KPHP Kampar Kiri (Unit XVIII)		2		2
116	Riau	KPHP Tebing Tinggi (Unit XXIV)		2		2
117	Riau	KPHK Danau Pulau Besar		1	2	3
118	Riau	KPHK Giam Siak Kecil-Bukit Batu		1	2	3
119	Riau	KPHK Rimbang Baling		1	2	3
120	Riau	KPHP Tasik Besar Serkap		3		3
121	Riau	KPHL Kuantan Singingi Unit XXXI		3	3	6
122	Sulawesi Barat	KPHL Mapili		1		1
123	Sulawesi Barat	KPHL Ganda Dewata (Unit XII)		2		2
124	Sulawesi Barat	KPHL Mamasa Tengah (Unit VIII)		2		2
125	Sulawesi Barat	KPHP Budong-Budong (Unit V)		2		2

No	Provinsi	Penempatan	2016			Total
			D3	S1	SMK	
126	Sulawesi Barat	KPHL Unit II Lariang		1	2	3
127	Sulawesi Barat	KPHP Karama Unit VI		2	2	4
128	Sulawesi Barat	KPHP Karossa Unit IV		2	2	4
129	Sulawesi Barat	KPHP Mamasa Barat (Unit VII)		2	2	4
130	Sulawesi Selatan	BDK Makassar		1	1	2
131	Sulawesi Selatan	KPHK Bangkala Mario		2	1	3
132	Sulawesi Selatan	KPHK Towuti		1	2	3
133	Sulawesi Selatan	KPHP Awota (Bagian Unit V Dan Bagian Unit VI)		1	2	3
134	Sulawesi Selatan	KPHP Jeneberang (Unit IX)		3		3
135	Sulawesi Selatan	KPHL Larona Malili (Unit I)		3	2	5
136	Sulawesi Selatan	KPHP Kep. Selayar (Unit X)		2	5	7
137	Sulawesi Tengah	KPHK Pamona		1	1	2
138	Sulawesi Tengah	KPHP Dampelas Tinombo		2		2
139	Sulawesi Tengah	KPHK Bakiriang-Lombuyan-Pati-Pati		1	2	3
140	Sulawesi Tengah	KPHK Morowali		1	2	3
141	Sulawesi Tengah	KPHP Tojo Una-Una (Unit XVII)			3	3
142	Sulawesi Tengah	KPHP Peling Unit XXI		3	1	4
143	Sulawesi Tengah	KPHP Banawa Lalundu Unit VII		2	3	5
144	Sulawesi Tengah	KPHP Gunung Dako Unit II		2	3	5
145	Sulawesi Tengah	KPHP Dolago Tanggunung (Unit VI Dan Unit IX)	1	2	3	6
146	Sulawesi Tenggara	KPHK Lambusango		1	2	3
147	Sulawesi Tenggara	KPHK Peropa		1	2	3
148	Sulawesi Tenggara	KPHL Konawe (Unit XXII) (Laiwoi)		1	2	3
149	Sulawesi Tenggara	KPHL Mekongga Selatan Unit XIII		1	2	3
150	Sulawesi Tenggara	KPHL Ueesi Unit XIV			3	3
151	Sulawesi Tenggara	KPHP Unit III Lakompa		2	1	3
152	Sulawesi Tenggara	KPHP Unit XXIV Atau Gularaya		1	2	3
153	Sulawesi Tenggara	KPHL Peropa'Ea Gantara (Unit VII)			4	4
154	Sulawesi Tenggara	KPHP Ladongi Unit XII		2	2	4
155	Sulawesi Tenggara	KPHP Mekongga Selatan Unit XI		2	2	4
156	Sulawesi Tenggara	KPHP Bina Mahawana Sejuk Unit XIX		3	2	5
157	Sulawesi Utara	KPHP Poigar		1		1
158	Sulawesi Utara	KPHK Nantu		1	2	3
159	Sulawesi Utara	KPHK Tangkoko		1	2	3
160	Sulawesi Utara	KPHL Unit VI Lintas Sulut			3	3
161	Sumatera Barat	KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)		1		1
162	Sumatera Barat	KPHK Limapuluh Kota		1	1	2
163	Sumatera Barat	KPHK Lembah Anai		1	2	3
164	Sumatera Barat	KPHL Solok (Unit VI)		1	3	4
165	Sumatera Barat	KPHL Sijunjung		2	4	6
166	Sumatera Selatan	KPHK Padang Sugihan		1	2	3
167	Sumatera Selatan	KPHP Benakat (Unit XIV) Ogan Komering		1	3	4

No	Provinsi	Penempatan	2016			Total
			D3	S1	SMK	
168	Sumatera Selatan	KPHP Lakitan (Unit VI)		1	3	4
169	Sumatera Selatan	KPHL Bukit Nanti Unit XV		2	3	5
170	Sumatera Selatan	KPHL Dempo Unit XII		1	4	5
171	Sumatera Selatan	KPHL Ogan Ulu Unit XIII	1	1	3	5
172	Sumatera Selatan	KPHL Peraduan Gistang Unit XVI	1	1	3	5
173	Sumatera Selatan	KPHP Suban Jeriji Unit XIV	1	2	2	5
174	Sumatera Selatan	KPHP Lalan Sembilang Unit II		3	3	6
175	Sumatera Utara	KPHK Barumun		1	2	3
176	Sumatera Utara	KPHK Karang Gading		1	2	3
177	Sumatera Utara	KPHP Mandailing Natal		1	2	3
178	Sumatera Utara	KPHL Lintas Sumatera Utara		3	3	6
<b>Grand Total</b>			<b>23</b>	<b>258</b>	<b>319</b>	<b>600</b>

Lampiran 7. Rincian Pelaksanaan Kegiatan Uji Kompetensi SDM LHK

No	Provinsi	Peserta	Jabatan								Total	
			Polhut		Penyuluh Kehutanan		PEH		KPHK /KKPH			
			K	BK	K	BK	K	BK	K	BK	K	BK
1	Sulawesi Selatan	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0
2	Kalimantan Timur	66	35	0	0	0	30	1	0	0	65	1
3	Kalimantan Selatan	26	3	1	0	0	22	0	0	0	25	1
4	Kalimantan Tengah	26	12	0	0	0	14	0	0	0	26	0
5	Kalimantan Barat	73	44	0	1	0	28	0	0	0	73	0
6	Riau	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28	0
7	Jawa Barat	31	0	0	0	0	0	0	30	1	30	1
8	Jawa Tengah	30	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0
9	DKI Jakarta	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
10	Papua	56	43	1	2	0	11	0	0	0	55	1
11	Papua Barat	33	22	0	1	0	10	0	0	0	33	0
12	Sulawesi Utara	24	10	1	1	0	12	0	0	0	23	1
13	Sulawesi Tengah	41	17	1	0	0	23	0	0	0	40	1
14	Sulawesi Tenggara	54	28	4	1	0	21	0	0	0	50	4
15	Gorontalo	11	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0
16	Sulawesi Selatan	64	17	0	2	0	45	0	0	0	64	0
17	Maluku	29	7	0	0	0	22	0	0	0	29	0
18	Maluku Utara	17	6	0	0	0	11	0	0	0	17	0
TOTAL		634	266	8	40	0	260	1	58	1	<b>624</b>	10

Lampiran 8. Rincian Capaian Meningkatnya Kapasitas Geneasi Muda LH

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Target Peserta (orang)	Realisasi Peserta (orang)
1	Pelaksanaan "Pelatihan Perilaku Ramah Lingkungan Bagi Pendidik Tingkat TK"	Kantor Puslatmas &PGL, Kawasan Puspiptek, Tangsel	40	40
2	Pelaksanaan "Pelatihan Perilaku Ramah Lingkungan Bagi Pendidik Tingkat SD/MI"	Kantor Puslatmas &PGL, Kawasan Puspiptek, Tangsel	40	41
3	Pelaksanaan "Pelatihan Perilaku Ramah Lingkungan Bagi Peserta Didik Tingkat TK Wilayah Kota Bandung"	Aula Karang Setra Hotel, Kota Bandung	300	300
4	Pelaksanaan "Pelatihan Perilaku Ramah Lingkungan Bagi Peserta Didik Tingkat SD/MI Wilayah Kabupaten Garut"	Gedung Graha Intan Balarea, Kab Garut	260	260
5	Pelaksanaan "Pelatihan Perilaku Ramah Lingkungan Bagi Peserta Didik Tingkat SMP/MTS Wilayah Kota Cirebon"	Gedung Wanita Kota Cirebon	200	204
	Pelatihan Perilaku Ramah Lingkungan bagi Siswa SMA/Sederajat Di Indramayu	-	100	-
6	Pelaksanaan "Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Masyarakat Sekitar Hutan" di Kota Singkawang, Kalimantan Barat	Kota Singkawang, Kalimantan Barat	30	31
7	Pelaksanaan "Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Masyarakat Sekitar Hutan" di Kota Pekanbaru, Riau	Kota Pekanbaru	30	30
<b>TOTAL</b>			<b>1.000</b>	<b>906</b>

Lampiran 9. Sebaran Saka Kalpataru Penegak dan Pandega

No.	Lokasi Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan	Realisasi Jumlah Peserta
1.	Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Buper Babarsari, Jl. Babarsari, Depok.	25 - 27 Maret 2016.	483
2.	Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kwarcab Kota Palembang, Jl. Srijaya I/ Pamuka, Komplek Pemda Km. 5,5.	18 - 20 April 2016.	373
3.	Kota Bandar Lampung, Lampung, Kwarda Propinsi Lampung, Jl. Pramuka, No. 4, Kedaton.	3 - 5 Juni 2016.	468
4.	Kota Majalengka, Jawa Barat, BDLHK Kadipaten, Jl. Raya Timur Sawala.	29 - 31 Juli 2016.	236
5.	Kota Makassar, Sulawesi Selatan, GOR Sudiang, Jl. Pajjaiang, Biring Kanaya.	4 - 6 Agustus 2016.	291
6.	Kota Majalengka, Jawa Barat, BDLHK Kadipaten, Jl. Raya Timur Sawala.	23 - 25 September 2016.	200
Total Peserta			2.051

Lampiran 10. SK Kepala Badan P2SDM tentang Personil Pengelola Kinerja Lingkup badan P2SDM Tahun 2016



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : SK.3/P2SDM/SET/REN.3/2/2016

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSONIL PENGELOLA KINERJA LINGKUP  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

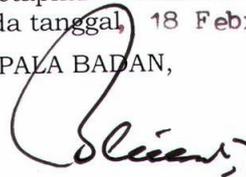
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan monitoring dan pelaporan kinerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya manusia, perlu menetapkan Personil Pengelola Kinerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2016 dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN PERSONIL PENGELOLA KINERJA LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2016
- PERTAMA : Susunan personil pengelolaan kinerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM) Tahun 2016 sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada personel tersebut, serta uraian tugas masing-masing sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas personil pengelolaan kinerja lingkup Badan P2SDM Tahun 2016, meliputi :
- a. Monitoring kemajuan penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja lingkup Badan P2SDM;
  - b. Monitoring kemajuan Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan P2SDM;
  - c. Monitoring kemajuan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) masing-masing satuan kerja; dan
  - d. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Badan P2SDM.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada masing-masing satuan kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Februari 2016  
KEPALA BADAN,



Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, MM  
NIP. 19561215 198203 1 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Sekretaris Badan P2SDM.
4. Kepala Pusat Penyuluhan.
5. Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM.
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK.
7. Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan PGL
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan P2SDM.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : SK.3/P2SDM/SET/REN.3/2/2016

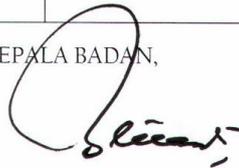
Tentang : PENETAPAN PERSONIL PENGELOLA KINERJA LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2016

SUSUNAN PERSONIL PENGELOLA KINERJA LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2016

No.	Jabatan	Nama	Uraian Tugas
1	Penanggung Jawab	Kepala Badan P2SDM	
2	Ketua	Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan capaian kinerja pada masing-masing eselon II lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM;</li> <li>2. Mengkoordinasikan pengendalian capaian IKU, IKK dan penyerapan anggaran;</li> <li>3. Melaporkan kemajuan capaian kinerja dan LKj kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</li> </ol>
3	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Pusat Penyuluhan</li> <li>2. Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM</li> <li>3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK</li> <li>4. Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Ketua dalam mengkoordinir capaian kinerja pada unit eselon II lingkup Badan P2SDM.</li> <li>2. Melaporkan kemajuan capaian kinerja dalam LKj masing-masing eselon II kepada Kepala Badan.</li> </ol>
4	Sekretaris	Kepala Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghimpun perkembangan capaian IKU, IKK dan penyerapan anggaran dari masing-masing satker;</li> <li>2. Mengevaluasi capaian IKU, IKK dan penyerapan anggaran serta menemukan solusi permasalahannya;</li> <li>3. Melaporkan hasil monitoring kepada Ketua.</li> </ol>
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Program dan Kerjasama, Sekretariat Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM</li> <li>2. Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</li> <li>3. Kepala Bidang Pengembangan Penyuluh</li> <li>4. Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluh</li> <li>5. Kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan, Pusat Penyuluhan;</li> <li>6. Kepala Bidang Standarisasi dan Sertifikasi SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Perencanaan Pengembangan SDM;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring kemajuan capaian pelaksanaan IKU dan IKK lingkup Badan P2SDM;</li> <li>2. Monitoring kemajuan penyerapan anggaran lingkup Badan P2SDM;</li> <li>3. Meng-input data kemajuan capaian IKU, IKK dan penyerapan anggaran pada satker;</li> <li>4. Melaporkan hasil monitoring pelaksanaan IKU, IKK dan penyerapan anggaran bulanan, triwulan dan semester kepada Ketua;</li> <li>5. Menyusun LKj Badan P2SDM.</li> </ol>

	<p>7. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning, Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK;</p> <p>8. Kepala Bagian Program dan Umum, Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan.</p> <p>9. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan P2SDM;</p> <p>10. Kepala Sub Bagian Program, Sekretariat Badan P2SDM;</p> <p>11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pusat Penyuluhan;</p> <p>12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pusat Perencanaan Pengembangan SDM;</p> <p>13. Kepala Sub Bidang Evaluasi Akreditasi dan Kerja Sama;</p> <p>14. Kepala Sub Bagian Program, Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan</p> <p>15. Staf Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan P2SDM.</p>	
--	--	--

KEPALA BADAN,



Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, MM  
NIP. 19561215 198203 1 002

Lampiran 11. Surat Kepala Badan P2SDM pada Sekretaris Jenderal KLHK sesuai Rekomendasi Inspektorat Jenderal KLHK atas Implementasi SAKIP Tahun 2015



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 14 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270  
Email : bp2sdmk@dephut.go.id Telp. : (021) 5731815 Fax. : (021) 5731815

10 Mei 2016

Nomor : S.118/P2SDM/SET/REN.0/5/2016  
Derajat/Sifat : Penting/Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan penyesuaian target renstra Kementerian LHK

Yth.  
Sekretaris Jenderal, Kementerian LHK  
Di  
Tempat

Menindaklanjuti surat Inspektur Jenderal Kementerian LHK Nomor SP.31/ITJEN-  
INSP.1/III/2016 Tanggal 14 Maret 2016 perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi  
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 pada Badan  
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bersama ini kami  
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Evaluasi Bab II point A (*sebagaimana terlampir*) terjadi ketidakselarasan antara Renstra Kementerian LHK dengan Renstra Badan P2SDM.
2. Perlu kami sampaikan bahwa target pada Renstra Badan P2SDM telah kami susun berdasarkan target RPJM Nasional, sedangkan target pada Renstra Kementerian LHK masih belum sesuai dengan target RPJM Nasional, sehingga berdasarkan hasil temuan dari Inspektorat Jenderal Kementerian LHK terdapat perbedaan antara target Renstra Badan P2SDM dengan target Renstra Kementerian LHK.
3. Terkait dengan butir 2 di atas, maka kami mohon agar target Renstra Kementerian LHK disesuaikan dengan target RPJM Nasional, khususnya untuk Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr. Ir. Bambang Soepijanto, MM  
NIP. 19561215 198203 1 002

Tembusan Yth.:  
Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Lampiran 12. Perubahan Target Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2016 sebagai Tindak Lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal KLHK atas Implementasi SAKIP Tahun 2015

Tabel Perubahan Target Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2016 berdasarkan Rekomendasi Inspektorat Jenderal KLHK

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Renstra BP2SDM Tahun 2015-2019					Renja BP2SDM Tahun 2016	
		2015	2016	2017	2018	2019	Semula	Menjadi
1	Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH (orang)	1.236	<b>600</b>	4.390	4.390	4.384	1.777	<b>600</b>
2	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan (orang)	280	<b>700</b>	420	450	450	719	<b>700</b>

Lampiran 13. Surat Kepala Pusat Diklat terhadap Tindak Lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal KLHK atas Implementasi SAKIP Tahun 2015



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM  
**PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan Mayjen Ishak Juarsa Gunung Batu Kotak Pos 141 – Bogor 16118  
Telp: (0251) 8313622 Fax. (0251) 8323565, 8312841  
e-mail : [pusdiklat@dephut.go.id](mailto:pusdiklat@dephut.go.id) ; website : <http://pusdiklat.dephut.go.id>

1573

Nomor : S. 692/Dik/Pu/OTL.2/5/2016 4 Mei 2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

Yth. Kepala Badan P2SDM  
di Jakarta

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 nomor SP. 31/ITJEN-ITWIL.I/RHS/2016 Tanggal 14 Maret 2016 perihal seperti pada pokok surat, dengan hormat kami laporkan bahwa, kami telah melakukan revisi pada renstra Tahun 2015 - 2019 dan Renja Tahun 2015 Pusat Diklat SDM LHK untuk indikator sasaran elemen kegiatan pengelolaan KHDTK dan indikator sasaran kegiatan jumlah SDM LHK yang lulus karyasiswa Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Indikator sasaran elemen kegiatan pengelolaan KHDTK

No	Tahun	Renstra KLHK	Renstra BP2SDM	Renstra Pusklat Semula	Renstra Pusklat Menjadi
1	2015		1	1	1
2	2016		2	1	2
3	2017		2	1	2
4	2018		1	1	1
5	2019		1	1	1
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

2. indikator sasaran kegiatan jumlah SDM LHK yang lulus karyasiswa Tahun 2015

Indikator Sasaran Kegiatan	Renstra BP2SDM Target Tahun 2015	Renstra Pusklat Target Tahun 2015 (Semula)	Renstra Pusklat Target Tahun 2015 (Menjadi)	PK Pusklat Tahun 2015	Renja Pusklat Tahun 2015 (Semula)	Renja Pusklat Tahun 2015 (Menjadi)
Karyasiswa S2	40	100	40		106	40
Karyasiswa S3	5	50	5		56	5
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>150</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>162</b>	<b>45</b>

Secara terinci perubahan dimaksud adalah sebagaimana dokumen Renstra (2015-2019) dan dokumen Renja 2015 terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,

  
Dr. Ir. Joko Prihatno, M.M.  
NIP.19601014 198803 1 002

Tembusan :

➤ Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM